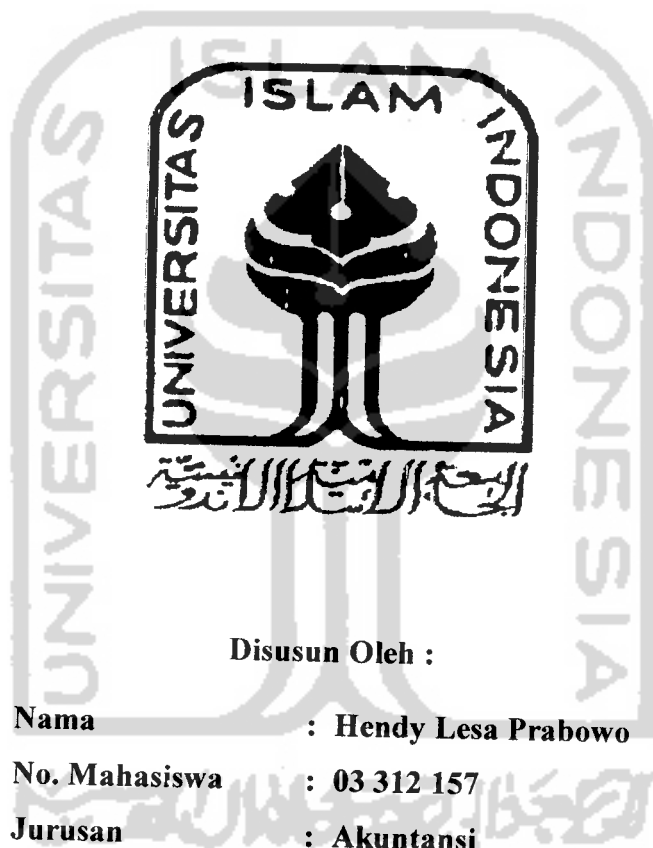


**PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN DANA PERIMBANGAN**

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri)



Disusun Oleh :

Nama : Hendy Lesa Prabowo

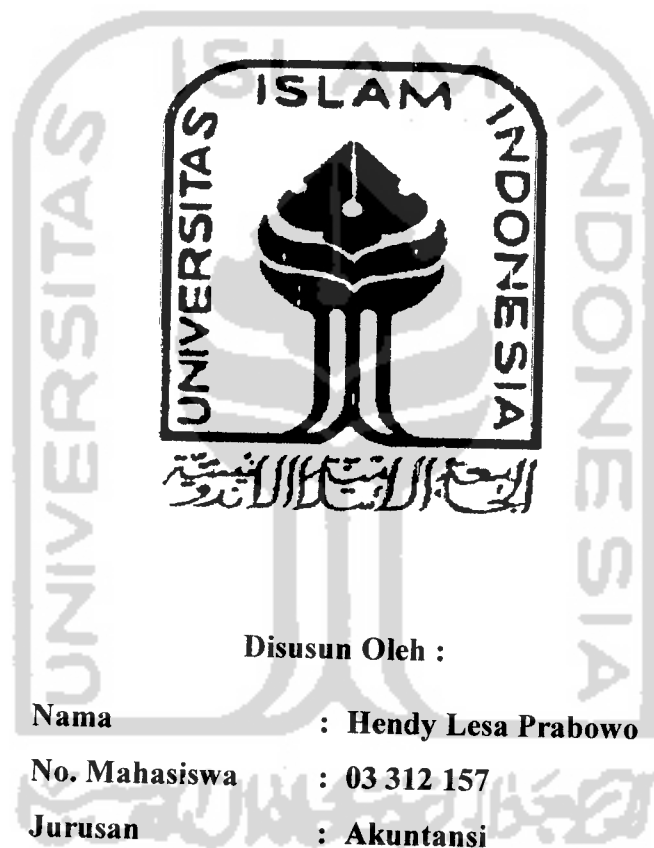
No. Mahasiswa : 03 312 157

Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

**PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN DANA PERIMBANGAN
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri)**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007**

**PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN**

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Diajukan oleh

Nama : Hendy Lesa Prabowo
Nomor Mahasiswa : 03.312.157
Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku. “



Yogyakarta, 17 April 2007

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendy Lesa Prabowo', is written over the printed name. The signature is stylized and somewhat cursive.

(Hendy Lesa Prabowo)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN**

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri)

Hasil Penelitian

Diajukan oleh

Nama : Hendy Lesa Prabowo

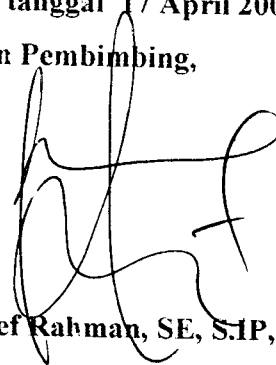
Nomor Mahasiswa : 03.312.157

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen pembimbing

Pada tanggal 17 April 2007

Dosen Pembimbing,



(Arief Rahman, SE, S.IP, M.Com)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN**

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri)

Hasil Penelitian

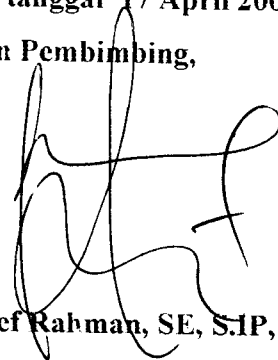
Diajukan oleh

Nama : Hendy Lesa Prabowo
Nomor Mahasiswa : 03.312.157
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen pembimbing

Pada tanggal 17 April 2007

Dosen Pembimbing,



(Arief Rahman, SE, S.IP, M.Com)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

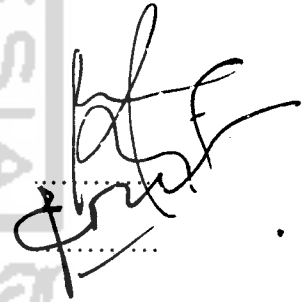
Peran dan Orientasi Pemda Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan dana Perimbangan (Studi Kasus Pada Pemda Kabupaten Wonogiri)

Disusun Oleh: HENDY LESA PRABOWO
Nomor mahasiswa: 03312157

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 22 Mei 2007

Pembimbing Skripsi/Penguji : Arief Rahman, SE, M.Com

Penguji : Dra. Erna Hidayah, M.Si, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

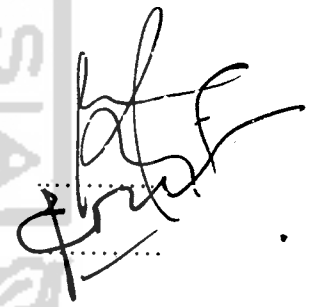
Peran dan Orientasi Pemda Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan dana Perimbangan (Studi Kasus Pada Pemda Kabupaten Wonogiri)

Disusun Oleh: HENDY LESA PRABOWO
Nomor mahasiswa: 03312157

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 22 Mei 2007

Pembimbing Skripsi/Penguji : Arief Rahman, SE, M.Com

Penguji : Dra. Erna Hidayah, M.Si, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Amal Ishak, M.Bus, Ph.D

MOTTO

“ Dan minta pertolonganlah kamu dengan kesabaran dan dengan sholat, dan sesungguhnya sholat amatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk tunduk jiwanya.” (QS. Al-Baqarah [2] : 45)

“...Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu diantara kamu beberapa tingkat lebih tinggi.”
(QS. Al-Mujadilah [58] : 11)

“.....Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu jika kalian mengerjakannya, kalian akan saling mengasihi? Sebarkan salam di antara kalian.”
(HR. Abu Hurairah)

Siapa yang merasa senang dengan pujian orang terhadap dirinya, berarti dia mengizinkan syaitan untuk masuk ke dalam perutnya.

(Ahmad Athailah)

Apabila kita takut akan kegagalan, berarti kita membatasi kemampuan kita.
(Henry Ford)

Saya tidak pernah terkesan dengan ijazah, karena ijazah tidak bisa bekerja.
(Soichiro Honda)

MOTTO

“ Dan minta pertolonganlah kamu dengan kesabaran dan dengan sholat, dan sesungguhnya sholat amatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk tunduk jiwanya.” (QS. Al-Baqarah [2] : 45)

“ ...Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu diantara kamu beberapa tingkat lebih tinggi.”
(QS. Al-Mujadilah [58] : 11)

“Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu jika kalian mengerjakannya, kalian akan saling mengasihi? Sebarkan salam di antara kalian.”
(HR. Abu Hurairah)

Siapa yang merasa senang dengan pujian orang terhadap dirinya, berarti dia mengizinkan syaitan untuk masuk ke dalam perutnya.

(Ahmad Athailah)

Apabila kita takut akan kegagalan, berarti kita membatasi kemampuan kita.
(Henry Ford)

Saya tidak pernah terkesan dengan ijazah, karena ijazah tidak bisa bekerja.
(Soichiro Honda)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk :

Mama dan Papa tercinta yang telah membimbing dan senantiasanya menghiasi hari-hariku dengan kasih sayang dan doanya,

Mbah Kung (Alm.), Uti Jogja, Babeh, dan Uti Indramayu yang telah memanjakanku semasa kecil, kini dan seterusnya,

Adinda Tesrian dan Ricardo tersayang yang senantiasanya memberi canda dan tawa di tiap hariku,

Sahabat-sahabatku tercinta,

Almamater Universitas Islam Indonesia yang telah membesarkanku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan”* ini dengan lancar. Tak lupa shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, nabi akhir zaman pembawa kebenaran Islam yang hakiki.

Penelitian ini merupakan tugas akhir yang penulis susun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 dalam bidang ekonomi pada jurusan akuntansi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari, bahwa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suwandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Asmai Ishak, M.Bus, P.hD selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Budisena, MM, selaku Kepala Dispenda dan Bapak Surip Suprpto, S.IP beserta segenap jajaran DISPENDA Kabupaten Wonogiri yang telah banyak membantu memberikan data-data saat penuluis menyusun skripsi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan”*** ini dengan lancar. Tak lupa shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, nabi akhir zaman pembawa kebenaran Islam yang hakiki.

Penelitian ini merupakan tugas akhir yang penulis susun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 dalam bidang ekonomi pada jurusan akuntansi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari, bahwa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suwandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Asmai Ishak, M.Bus, P.hD selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Budisena, MM, selaku Kepala Dispenda dan Bapak Surip Suprpto, S.IP beserta segenap jajaran DISPENDA Kabupaten Wonogiri yang telah banyak membantu memberikan data-data saat penuluis menyusun skripsi

4. Bapak Edy Hartanto, SH, selaku Kasubid Anggaran Pembangunan Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri, yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis.
5. Ibu Dra. Erna Hidayah, M.Si selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen penguji skripsi, yang telah membimbing dari saat penulis masuk menjadi mahasiswa Universitas Islam Indonesia hingga kini serta memberikan masukan yang amat berarti bagi penulis
6. Bapak Arief Rahman, SE, S.IP, M.Com, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Kesit Bambang Prakosa, terima kasih atas bantuannya literaturnya.
8. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya, semoga penulis mampu mengamalkannya.
9. Mama dan Papa atas kasih sayang, doa dan pengorbanannya yang tulus sehingga mengantarkan penulis menjadi seperti ini. *Sungkem* dan *sun* sayang ananda sepanjang masa. Maaf, ananda belum bisa membalas apa-apa.
10. Mbah Kakung (Alm.), Uti Jogja, Babeh, dan Uti Indramayu, yang senantiasa memanjakan penulis semasa kecil, kini, hingga nanti. *Sungkem* dan *sun* cucunda sepanjang hayat. Maaf apabila cucunda banyak salah.
11. Tesrian dan Ricardo, “dua LESA kecilku yang hebat” yang selalu memberikan canda dan tawanya saat kita bersama. Terima kasih telah

4. Bapak Edy Hartanto, SH, selaku Kasubid Anggaran Pembangunan Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri, yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis.
5. Ibu Dra. Erna Hidayah, M.Si selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen penguji skripsi, yang telah membimbing dari saat penulis masuk menjadi mahasiswa Universitas Islam Indonesia hingga kini serta memberikan masukan yang amat berarti bagi penulis
6. Bapak Arief Rahman, SE, S.IP, M.Com, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Kesit Bambang Prakosa, terima kasih atas bantuan literturnya.
8. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya, semoga penulis mampu mengamalkannya.
9. Mama dan Papa atas kasih sayang, doa dan pengorbanannya yang tulus sehingga mengantarkan penulis menjadi seperti ini. *Sungkem* dan *sun* sayang ananda sepanjang masa. Maaf, ananda belum bisa membalas apa-apa.
10. Mbah Kakung (Alm.), Uti Jogja, Babeh, dan Uti Indramayu, yang senantiasa memanjakan penulis semasa kecil, kini, hingga nanti. *Sungkem* dan *sun* cucunda sepanjang hayat. Maaf apabila cucunda banyak salah.
11. Tesrian dan Ricardo, “dua LESA kecilku yang hebat” yang selalu memberikan canda dan tawanya saat kita bersama. Terima kasih telah

menginspirasi penulis untuk menjadi kakak yang baik bagi adik-adiknya.
Semoga kalian sukses dunia akhirat! Amin.

12. Sobat “Gank Oelat” (Afriza, Astrid, Bemby, Catur, Ezy, Julie, Lhatif, Nito, Puszy, Reki, Reni, *n’ Vhea*) yang selalu menemani penulis dari dulu hingga nanti (semoga!amin). Kalian adalah tempatku berpijak yang terindah!! Hingga tak cukup kata untuk melukiskan keindahan itu.
13. Anak-anak Ideia dan Lupus Band (Bemby, Catur, Didit, Ezy, Lhatif [pak manajer], Philip, Roy, Widhi), terima kasih telah mengenalkan penulis pada ‘denting-denting nada indah’. Kapan kita berkarya lagi *bro??* Kapan kita *Nge-band* lagi?? Kapan kita ‘berantem’ lagi?? *Keep music on u’r soul!!*
14. Sahabat-sahabat Jogja, Gunawan (*piye nde wani pora? kapan window meneh nde? makasih* atas semua kebaikanmu! *Keep contact!*), Danang (kapan ke bandara lagi sambil cari inspirasi? Sukses untukmu ya calon *entrepreneur*), Anif (kok jarang *kliatan bro?* sibuk kerja ya mas?), Dewi (orang yang selalu antusias! Ayo bangun Sumbawa dengan kapabilitasmu!!), Banun dan Karas (kamu adalah contoh dari cewek yang tangguh!) Aan, Afif, Nisa, dan Selvy (Ayo nongkrong bareng lagi di tempat gun! *Griya Dhahar* yuk?) Ade, Bayu, Edho, Ical, Mansur, Scem, Zaky (Ayo tanding lagi di rumahnya Edho!) Wisnu, Fatah, Rahman, dan Mirwan (*makasih udah mau maen ke Wonogiri*), Dhani Klaten (Ayo *PS wani pora?? makasih* ya komputernya!), Luthfi Cs (pertahankan kekompakan F4 *hehe..*), Eka Tile (Koordinator buku kenangan

sekaligus motor *Eks-Che*), Wisnu+Dian, Arif+Ditha, Agung+Winda (semoga kalian *langgeng* sampai nanti, anin).

15. *My sister* : De'Iya, De'Ari, Ayu, Depi, Liesa, *Makasih* atas semangatnya!
16. Teman-teman KOMISI (Komunitas Mahasiswa Akuntansi) : Arbi, Arif, Danz, Dewi, Ditha, Eko, Ian, Mekki, Mba Icha, Nophie, Wisnu, dan Zunansyah "Big Boss Dhani" (pengurus KOMISI 04-05, terima kasih telah mengajari ilmu tentang organisasi, ayo *tetep* semangat!) Dewi, Ditha, Wisnu (Dewan Penasihat KOMISI 05-06, kita *DP* yang paling kompak!), Tirta, Galih, Andham, Dydi'*Ndut*' (*hehe...:p*) dan *temen-temen* "penerus" KOMISI (pengurus, kaderisasi, maupun anggota) baik 2004, 2005, 2006, dan seterusnya, jaga dan rawatlah KOMISI kita agar tetap hidup dalam blantika komunitas di FE UII.
17. Temen-teman Eks-Che atas kenangannya di makrab, buka bersama, dan buku kenangan. *Keep contact friends!!*
18. Skuadra C++, Tim bola paling hebat abad ini *hehehe...Keep spirit football guys!!*
19. Anak-anak KKN Unit 28 Angkatan 32 Kring Tanjungsari, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman : Ami, Arlinto, Farisa, Rofik (kita adalah tim yang hebat, *makasih heb* atas pengalaman yang tak terlupakan!)
20. Para fungsionaris DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) yang terhormat periode 2006 - 2007 : Arif, Bahri, Bahrudin, Darmilis, Desi, Gunawan, Irfan,

menginspirasi penulis untuk menjadi kakak yang baik bagi adik-adiknya.
Semoga kalian sukses dunia akhirat! Amin.

12. Sobat “Gank Oelat” (Afriza, Astrid, Bemby, Catur, Ezy, Julie, Lhatif, Nito, Puszy, Reki, Reni, *n’* Vhea) yang selalu menemani penulis dari dulu hingga nanti (semoga!amin). Kalian adalah tempatku berpijak yang terindah!! Hingga tak cukup kata untuk melukiskan keindahan itu.
13. Anak-anak Ideia dan Lupus Band (Bemby, Catur, Didit, Ezy, Lhatif [pak manajer], Philip, Roy, Widhi), terima kasih telah mengenalkan penulis pada ‘denting-denting nada indah’. Kapan kita berkarya lagi *bro??* Kapan kita *Nge-band* lagi?? Kapan kita ‘berantem’ lagi?? *Keep music on u’r soul!!*
14. Sahabat-sahabat Jogja, Gunawan (*piye nde wani pora? kapan window meneh nde? makasih* atas semua kebaikanmu! *Keep contact!*), Danang (kapan ke bandara lagi sambil cari inspirasi? Sukses untukmu ya calon *entrepreneur*), Anif (kok jarang *kliatan bro? sibuk kerja ya mas?*), Dewi (orang yang selalu antusias! Ayo bangun Sumbawa dengan kapabilitasmu!!), Banun dan Karas (kamu adalah contoh dari cewek yang tangguh!) Aan, Afif, Nisa, dan Selvy (Ayo nongkrong bareng lagi di tempat gun! *Griya Dhahar yuk?*) Ade, Bayu, Edho, Ical, Mansur, Scem, Zaky (Ayo tanding lagi di rumahnya Edho!) Wisnu, Fatah, Rahman, dan Mirwan (*makasih udah mau maen* ke Wonogiri), Dhani Klaten (Ayo *PS wani pora?? makasih* ya komputernya!), Luthfi Cs (pertahankan kekompakan F4 *hehe..*), Eka Tile (Koordinator buku kenangan

sekaligus motor *Eks-Che*), Wisnu+Dian, Arif+Ditha, Agung+Winda (semoga kalian *langgeng* sampai nanti, amin).

15. *My sister* : De'Iya, De'Ari, Ayu, Depi, Liesa, *Makasih* atas semangatnya!
16. Teman-teman KOMISI (Komunitas Mahasiswa Akuntansi) : Arbi, Arif, Danz, Dewi, Ditha, Eko, Ian, Mekki, Mba Icha, Nophie, Wisnu, dan Zunansyah "Big Boss Dhani" (pengurus KOMISI 04-05, terima kasih telah mengajari ilmu tentang organisasi, ayo *tetep* semangat!) Dewi, Ditha, Wisnu (Dewan Penasihat KOMISI 05-06, kita *DP* yang paling kompak!), Tirta, Galih, Andham, Dydi'Ndut' (*hehe...p*) dan *temen-temen* "penerus" KOMISI (pengurus, kaderisasi, maupun anggota) baik 2004, 2005, 2006, dan seterusnya, jaga dan rawatlah KOMISI kita agar tetap hidup dalam blantika komunitas di FE UII.
17. Temen-teman Eks-Che atas kenangannya di makrab, buka bersama, dan buku kenangan. *Keep contact friends!!*
18. Skuadra C++, Tim bola paling hebat abad ini *hehehe...Keep spirit football guys!!*
19. Anak-anak KKN Unit 28 Angkatan 32 Kring Tanjungsari, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman : Ami, Arlinto, Farisa, Rofik (kita adalah tim yang hebat, *makasih heb* atas pengalaman yang tak terlupakan!)
20. Para fungsionaris DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) yang terhormat periode 2006 - 2007 : Arif, Bahri, Bahrudin, Darmilis, Desi, Gunawan, Irfan,

Nashir, Nashrullah, Nugroho, Novelinda, Wahid (kapan kita pleno lagi? kalian adalah calon politisi hebat!!).

21. Agung Temanggung, Agung Wonogiri, Aryani, Chici, Dwi, Fibriarto (“Bos Gorri”), Hany, Hasri, Irwan, Indro, Ida, Lia, Tommy, Wuri, Zull dan *temen-temen* Jogja yang tentunya tidak bisa disebutkan satu per satu. Tarima kasih atas semuanya.

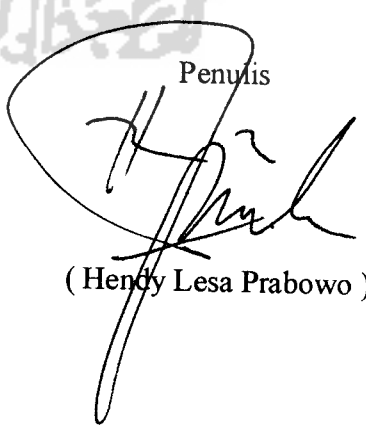
22. AD 4161 TG dan AD 2883 JG, terima kasih *udah nganterin* kemanapun aku melangkah!!

23. Juga semua pihak yang telah membantu penulis baik materiil maupun spirituil yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena adanya keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya semoga skripsi ini berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan mampu memberi warna tersendiri dalam khasanah ilmu akuntansi, semoga.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Penulis



(Hendy Lesa Prabowo)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan	iii
Berita Acara Skripsi	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar	xvii
Daftar Lampiran	xviii
Abstrak	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Metodologi Penelitian	9
1.6.1 Data yang Dibutuhkan	9
1.6.1.1 Data Umum	9
1.6.1.2 Data Khusus	9
1.6.2 Metode Pengumpulan Data	10
1.6.3 Metode Analisis Data	10
1.7 Sistematika Pembahasan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2005 Serta Penyelenggaraan Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004.....	13
2.1.1 Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2005	13
2.1.1.1 Prinsip Penyelenggaraan Pemda	16
2.1.1.2 Keuangan Daerah	18
2.1.2 Penyelenggaraan Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004.....	19
2.2 Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Era Otonomi Daerah.....	21
2.3 Elemen-elemen Penerimaan Daerah	23
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23
2.3.2 Dana Perimbangan	26
2.3.2.1 Dana Bagi Hasil	29
2.3.2.2 Dana Alokasi Umum	29
2.3.2.3 Dana Alokasi Khusus	31
2.4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Era Otonomi Daerah.....	32
2.5 Prinsip-prinsip Manajemen Penerimaan Daerah.....	34
2.6 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.....	35
BAB III TINJAUAN OBYEK PENELITIAN	
3.1 Data.....	38
3.1.1 Data Umum	38
3.1.1.1 Tugas pokok dan Fungsi Dispenda Kabupaten Wonogiri	38

3.1.1.2	Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Wonogiri	38
3.1.1.3	Visi, Misi dan Arah Kebijakan Dispenda Kabupaten Wonogiri	40
3.1.1.4	Prioritas Dispenda Kabupaten Wonogiri	41
3.1.2	Data Khusus	41
3.1.2.1	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri	41
3.1.2.2	Dana Alokasi Umum Kabupaten Wonogiri	44
3.1.2.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wonogiri.....	44
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	45
3.2.1	Survai	45
3.2.2	Wawancara	45
3.2.3	Studi Pustaka	46
3.3	Metode Analisis Data	46
3.3.1	Menghitung <i>Tax Ratio</i> , Rasio Kepatuhan Wajib Pajak, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	46
3.3.2	Menghitung Prosentase Masing-masing Pos dari Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari Total Pendapatan.....	47
3.3.3	Menghitung Kontribusi Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dan Pos Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	48
3.3.4	Menghitung Pertumbuhan Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	49

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52
4.2 Dana Perimbangan	67
4.3 Kendala-kendala	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

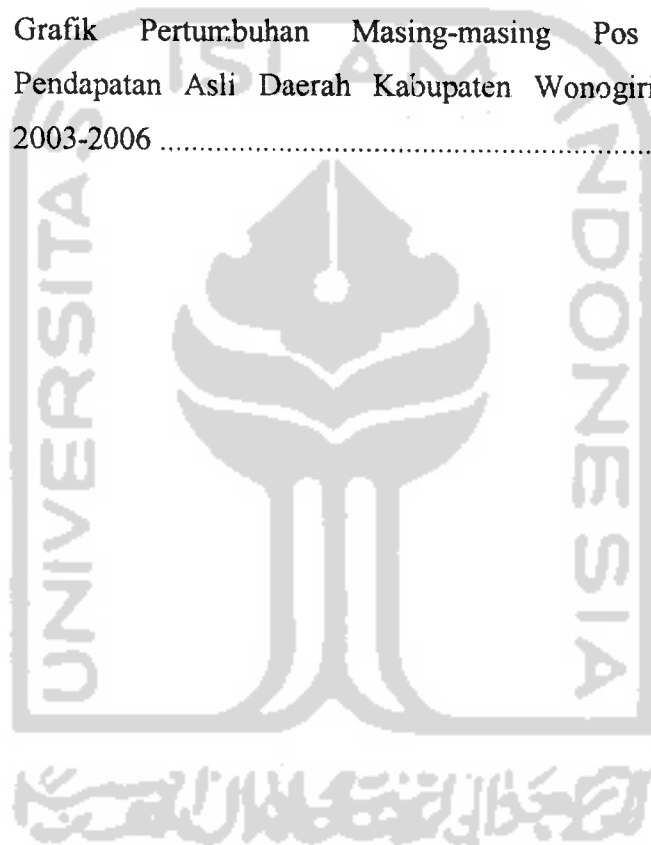


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	25
Tabel 2.2	Ikhtisar Dana Perimbangan Pusat-Daerah	27
Tabel 2.3	Alokasi Dana Desentralisasi dalam APBN 2001	28
Tabel 2.4	Struktur APBD dengan Pendekatan Kinerja Propinsi/ Kabupaten/ Kota	33
Tabel 3.1	Ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 – 2006	43
Tabel 3.2	Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 – 2006	44
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 – 2005	45
Tabel 4.1	<i>Tax Ratio</i> Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 – 2006	56
Tabel 4.2	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 – 2006	56
Tabel 4.3	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 – 2006	57
Tabel 4.4	Persentase Masing-masing Pos Pendapatan dalam APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 – 2006	59
Tabel 4.5	Kontribusi Masing Pos dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 – 2006	61
Tabel 4.6 ⁷	Kontribusi Masing-masing Pos dalam Dana Perimbangan Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 – 2006	63
Tabel 4.7	Pertumbuhan Masing-masing Pos dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 – 2006	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan Pusat-Daerah	22
Gambar 3.1	Bagan Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Wonogiri	39
Gambar 3.2	Desain Penelitian	51
Gambar 4.1	Grafik Pertumbuhan Masing-masing Pos dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2003-2006	67



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan	iii
Berita Acara Skripsi	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar	xvii
Daftar Lampiran	xviii
Abstrak	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Metodologi Penelitian	9
1.6.1 Data yang Dibutuhkan	9
1.6.1.1 Data Umum	9
1.6.1.2 Data Khusus	9
1.6.2 Metode Pengumpulan Data	10
1.6.3 Metode Analisis Data	10
1.7 Sistematika Pembahasan	11

3.1.1.2	Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Wonogiri	38
3.1.1.3	Visi, Misi dan Arah Kebijakan Dispenda Kabupaten Wonogiri	40
3.1.1.4	Prioritas Dispenda Kabupaten Wonogiri	41
3.1.2	Data Khusus	41
3.1.2.1	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri	41
3.1.2.2	Dana Alokasi Umum Kabupaten Wonogiri	44
3.1.2.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wonogiri.....	44
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	45
3.2.1	Survai	45
3.2.2	Wawancara	45
3.2.3	Studi Pustaka	46
3.3	Metode Analisis Data	46
3.3.1	Menghitung <i>Tax Ratio</i> , Rasio Kepatuhan Wajib Pajak, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	46
3.3.2	Menghitung Prosentase Masing-masing Pos dari Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari Total Pendapatan.....	47
3.3.3	Menghitung Kontribusi Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dan Pos Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	48
3.3.4	Menghitung Pertumbuhan Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	49

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52
4.2 Dana Perimbangan	67
4.3 Kendala-kendala	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



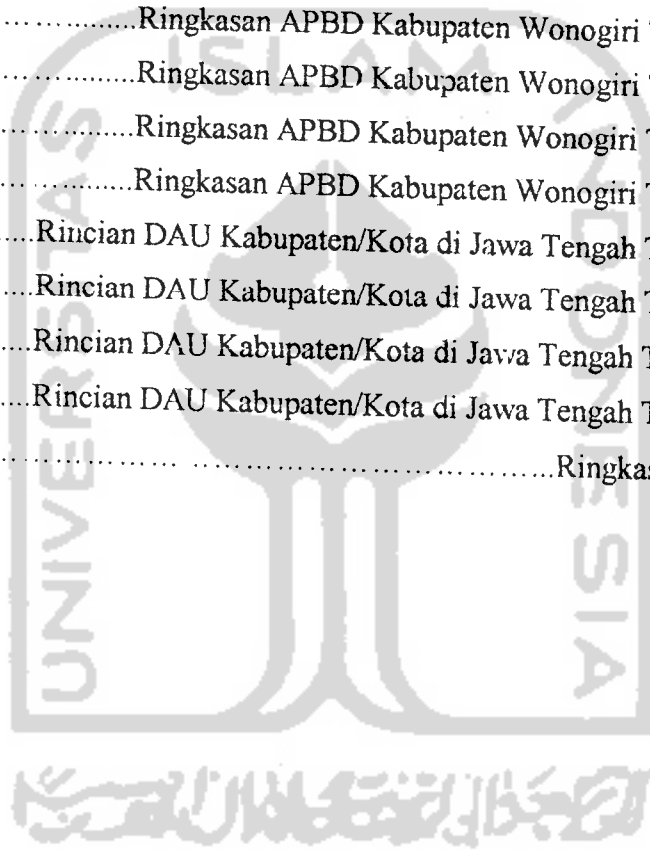
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan Pusat-Daerah	22
Gambar 3.1	Bagan Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Wonogiri	39
Gambar 3.2	Desain Penelitian	51
Gambar 4.1	Grafik Pertumbuhan Masing-masing Pos dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2003-2006	67



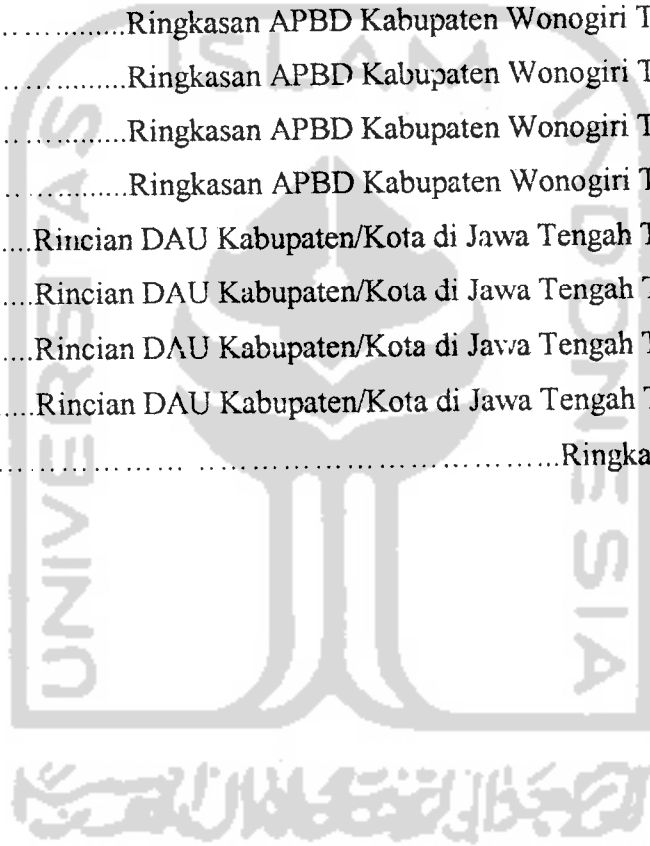
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari BAPPEDA Wonogiri
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari DISPENDA Wonogiri
Lampiran 4	Ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003
Lampiran 5	Ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2004
Lampiran 6	Ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005
Lampiran 7	Ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2006
Lampiran 8	Rincian DAU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003
Lampiran 9	Rincian DAU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004
Lampiran 10	Rincian DAU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005
Lampiran 11	Rincian DAU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006
Lampiran 12	Ringkasan Hasil Wawancara



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari BAPPEDA Wonogiri
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari DISPENDA Wonogiri
Lampiran 4	Ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003
Lampiran 5	Ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2004
Lampiran 6	Ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005
Lampiran 7	Ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2006
Lampiran 8	Rincian DAU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003
Lampiran 9	Rincian DAU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004
Lampiran 10	Rincian DAU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005
Lampiran 11	Rincian DAU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006
Lampiran 12	Ringkasan Hasil Wawancara



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD)-nya serta mengetahui sejauh mana formula perhitungan dana alokasi umum (DAU) yang ditetapkan dalam PP No. 55 Tahun 2005 memenuhi aspirasi daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah survai dan wawancara dengan mencari data dan fakta yang dikumpulkan secara empirik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Data yang diperoleh, setelah diolah merupakan bahan untuk melakukan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pada dasarnya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan PAD-nya adalah dengan dua cara yaitu : a) Intensifikasi, yaitu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada. Diintensifkan dalam artian operasional pemungutan dan pengawasannya untuk menekan kebocoran. Selain itu, upaya meningkatkan kualitas manajemen BUMD juga dilakukan untuk memperbaiki kinerja BUMD; b) Ekstensifikasi, yaitu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara mencari dan mengembangkan sumber pendapatan baru. Dalam hal ini Pemda setempat melakukan kerjasama ekspor *gaplek (cassava chip)* atau chip ketela pohon dengan Pemerintah Kota Naning, Guangzi, Tiongkok. Selain itu, sedang dibahasnya Raperda baru tentang pajak pesawat televisi perorangan dan Raperda penggunaan listrik di luar PLN diharapkan nantinya akan menambah PAD bagi Kabupaten Wonogiri, 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri setuju dengan formula perhitungan DAU yang ditetapkan dalam PP No. 55 Tahun 2005 dengan catatan adanya sedikit penambahan *score* serta adanya pelibatan daerah dalam menentukan *score* tersebut. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan yang jauh antara daerah yang kaya potensi alam dengan daerah yang miskin potensi alam.

Kata kunci : peran Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD)-nya serta mengetahui sejauh mana formula perhitungan dana alokasi umum (DAU) yang ditetapkan dalam PP No. 55 Tahun 2005 memenuhi aspirasi daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah survai dan wawancara dengan mencari data dan fakta yang dikumpulkan secara empirik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Data yang diperoleh, setelah diolah merupakan bahan untuk melakukan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pada dasarnya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan PAD-nya adalah dengan dua cara yaitu : a) Intensifikasi, yaitu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada. Diintensifikan dalam artian operasional pemungutan dan pengawasannya untuk menekan kebocoran. Selain itu, upaya meningkatkan kualitas manajemen BUMD juga dilakukan untuk memperbaiki kinerja BUMD; b) Ekstensifikasi, yaitu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara mencari dan mengembangkan sumber pendapatan baru. Dalam hal ini Pemda setempat melakukan kerjasama ekspor *gaplek (cassava chip)* atau chip ketela pohon dengan Pemerintah Kota Naning, Guangzi, Tiongkok. Selain itu, sedang dibahasnya Raperda baru tentang pajak pesawat televisi perorangan dan Raperda penggunaan listrik di luar PLN diharapkan nantinya akan menambah PAD bagi Kabupaten Wonogiri, 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri setuju dengan formula perhitungan DAU yang ditetapkan dalam PP No. 55 Tahun 2005 dengan catatan adanya sedikit penambahan *score* serta adanya pelibatan daerah dalam menentukan *score* tersebut. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan yang jauh antara daerah yang kaya potensi alam dengan daerah yang miskin potensi alam.

Kata kunci : peran Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda negeri ini telah berdampak besar pada roda kehidupan bangsa Indonesia. Krisis yang berbarengan dengan gerakan reformasi ini sebenarnya hanya berdampak pada sektor ekonomi saja, tetapi pada perkembangannya merambat pada semua sektor kehidupan bangsa yang artinya krisis ini berubah makna menjadi krisis multidimensi, tidak hanya krisis ekonomi. Kemudian gerakan reformasi yang dimulai sejak tahun 1997 memunculkan tuntutan untuk mengoreksi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Melihat fenomena yang terjadi, maka pemerintah dengan segera mengeluarkan Tap MPR RI No.XV/MPR/1998 yang merumuskan tentang pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah diberi kewenangan secara proporsional yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kemudian 2 (dua) tahun setelah keluarnya Tap MPR RI No.XV/MPR/1998, MPR kembali mengeluarkan Tap MPR RI No.IV/MPR/2000 yang merumuskan tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Ini merupakan respon MPR yang saat itu melihat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah saat itu belum dilaksanakan

sebagaimana mestinya, dimana banyak terjadi ketidakpuasan dan ketersinggungan antar daerah otonom. Pengejawantahan otonomi yang belum sempurna mendorong Tap tersebut lahir.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan selama enam tahunan ini menyisakan banyak pertanyaan, apakah formula ini sudah tepat untuk menghadapi pasar global nanti? Untuk itu pemerintah melakukan perubahan undang-undang otonomi daerah agar bisa lebih aplikatif. Undang-undang tentang otonomi yang terbaru adalah UU No.8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah mencakup 3 matra yang utama, yaitu pertama, pembagian kekuasaan mengelola pemerintahan (*governmental power sharing*) antara pusat dan daerah, kedua matra pembagian keuangan dan personalia negara (*financial and manpower sharing*) antara pusat dan daerah, dan ketiga matra pelimpahan kekuasaan politik, adat dan budaya (*political and social cultural power*) kepada daerah (Salim, 1999 dalam Ardiana, 2003).

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan akan tercipta *good governance*. *Good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *Good governance* menurut Bank Dunia adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan

Penelitian yang dilakukan oleh Memen Kustiawan (2002) pada Dispenda Propinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Pemda Jawa Barat untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan bagi APBD adalah dengan meningkatkan jumlah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah. Akan tetapi hendaknya diperhatikan apakah peningkatan pendapatan tersebut tidak memunculkan masalah baru akibat reaksi masyarakat yang tentunya tidak akan menyetujui adanya kenaikan tersebut. Selain itu, penelitian yang dilakukan Memen Kustiawan (2002) juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap rumusan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap dana alokasi umum melalui Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2000.

Dapat terlihat misalnya, pemerintah daerah Jember melakukan protes karena kecilnya dana alokasi umum yang mereka terima, yaitu sebesar 300 milyar, padahal kebutuhan belanja pegawai mereka saja diperkirakan 275 milyar, yang artinya dana alokasi umum tersebut hanya cukup untuk kebutuhan belanja pegawai saja. Pemerintah daerah Bekasi juga melakukan protes kepada Depdagri karena hanya menerima sebesar 184,7 milyar, padahal mereka mengharapkan akan menerima sebesar 250 milyar - 800 milyar. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan pendelegasian dalam perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber yang ada di daerah untuk digunakan sebagai sumber pembangunan di daerah. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, jelas bahwa kesiapan dan profesionalisme pemerintah daerah mutlak diperlukan.

Dalam Hariian Umum Republika taanggal 25 Maret 2000, Sekretaris Dirjen Pemerintah Umum dan Daerah (PUMDA) Depdagri dan Otonomi Daerah, Sudarsono mengatakan bahwa :

"Rumusan tersebut merupakan rumusan baku untuk perhitungan dana alokasi umum, tetapi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) akan melakukan evaluasi ulang atas penetapan dana alokasi umum tadi."

Ternyata, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah benar-benar melakukan evaluasi ulang mengenai rumusan perhitungan dana alokasi umum pada Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2001. Atas usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, akhirnya pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 dan dituangkan pada Peraturan Pemerintah No.84 Tahun 2001. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2001 menggantikan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000. Dalam perjalannya selama 4 (empat) tahun, Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2001 kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dan berlaku sampai saat ini.

Kemudian penelitian yang dilakukan Yuyun Ardiyana (2004) pada Dispenda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa pemerintah daerah DIY mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- 1) intensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan pendapatan yang sudah ada, seperti pajak dan retribusi daerah.
- 2) ekstensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru, seperti penanganan kendaraan bermotor non AB yang beroperasi di Yogyakarta lebih dari 3 (tiga) bulan

dengan cara mengeluarkan tanda bukti berupa kartu identitas KBM musiman.

Selain mengoptimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga masih mengharapkan sumber lain, yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari :

- 1) dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta dari sumber daya alam yaitu dari ke'utanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangangas bumi, dan pertambangan panas bumi.
- 2) dana alokasi umum; dan
- 3) dana alokasi khusus.

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah yang satu dengan lainnya. Namun, yang menjadi permasalahannya sekarang, apakah pemerintah daerah telah merasa bahwa perhitungan dana alokasi umum dengan menggunakan rumus dalam PP No. 55 Tahun 2005 (pengganti PP No.84 Tahun 2001) telah memenuhi aspirasi daerahnya? Dan pada pelaksanaan otonomi daerah ini, pemerintah daerah memegang peranan yang vital dalam perencanaan pembangunan, pengalokasian dan pengelolaan sumber-sumber yang ada di daerah. Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di Indonesia pun memiliki kewajiban dan tantangan yang sama. Melalui Dinas Pendapatan Daerah

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini menitikberatkan pada peran dan orientasi Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatnya mengenai formula dana alokasi umum (DAU). Pemerintah daerah yang akan diteliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dengan memfokuskan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri.

1.4 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dan upaya perbaikan perumusan dana alokasi umum (DAU) sehingga memenuhi aspirasi daerah. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi adalah untuk :

- 1) Mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.
- 2) Mengetahui sejauh mana perumusan perhitungan Dana Alokasi Umum yang terdapat dalam PP No. 55 Tahun 2005 telah memenuhi aspirasi daerah Kabupaten Wonogiri atau tidak

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat digunakan sebagai acuan dan referensi awal untuk melakukan penelitian selanjutnya bagi para peneliti di bidang otonomi daerah dan pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 2) Diharapkan berguna untuk memperluas cakrawala dan tambahan informasi bagi para akademisi guna menemukan dimensi-dimensi baru dalam bidang ilmu keuangan daerah khususnya PAD dan DAU
- 3) Diharapkan akan membuka wawasan baru bagi aparat daerah sekaligus sebagai aspek guna laksana maupun masyarakat, berkenaan dengan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai masukan berharga untuk perumusan ulang kebijakan yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan lain yang lebih adil sehingga tercipta keselarasan.

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi dari penelitian ini meliputi :

1.6.1 Data yang Dibutuhkan

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :

1.6.1.1 Data Umum

Data umum yang dibutuhkan adalah :

- 1) tugas pokok dan fungsi Dispenda Wonogiri
- 2) struktur organisasi Dispenda Wonogiri
- 3) visi, misi, dan arah kebijakan Dispenda Wonogiri
- 4) prioritas Dispenda Wonogiri.

1.6.1.2 Data Khusus

Data khusus yang dibutuhkan adalah :

- 1) APBD Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2003 s/d 2006
- 2) Dana alokasi umum (DAU)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda negeri ini telah berdampak besar pada roda kehidupan bangsa Indonesia. Krisis yang berbarengan dengan gerakan reformasi ini sebenarnya hanya berdampak pada sektor ekonomi saja, tetapi pada perkembangannya merambat pada semua sektor kehidupan bangsa yang artinya krisis ini berubah makna menjadi krisis multidimensi, tidak hanya krisis ekonomi. Kemudian gerakan reformasi yang dimulai sejak tahun 1997 memunculkan tuntutan untuk mengoreksi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Melihat fenomena yang terjadi, maka pemerintah dengan segera mengeluarkan Tap MPR RI No.XV/MPR/1998 yang merumuskan tentang pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah diberi kewenangan secara proporsional yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kemudian 2 (dua) tahun setelah keluarnya Tap MPR RI No.XV/MPR/1998, MPR kembali mengeluarkan Tap MPR RI No.IV/MPR/2000 yang merumuskan tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Ini merupakan respon MPR yang saat itu melihat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah saat itu belum dilaksanakan

sebagaimana mestinya, dimana banyak terjadi ketidakpuasan dan ketersinggungan antar daerah otonom. Pengejawantahan otonomi yang belum sempurna mendorong Tap tersebut lahir.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan selama enam tahunan ini menyisakan banyak pertanyaan, apakah formula ini sudah tepat untuk menghadapi pasar global nanti? Untuk itu pemerintah melakukan perubahan undang-undang otonomi daerah agar bisa lebih aplikatif. Undang-undang tentang otonomi yang terbaru adalah UU No.8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah mencakup 3 matra yang utama, yaitu pertama, pembagian kekuasaan mengelola pemerintahan (*governmental power sharing*) antara pusat dan daerah, kedua matra pembagian keuangan dan personalia negara (*financial and manpower sharing*) antara pusat dan daerah, dan ketiga matra pelimpahan kekuasaan politik, adat dan budaya (*political and social cultural power*) kepada daerah (Salim, 1999 dalam Ardiana, 2003).

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan akan tercipta *good governance*. *Good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *Good governance* menurut Bank Dunia adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan

pengecahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan legal bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Good governance* juga diartikan sebagai sistem pemerintah yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik (World Bank, 1992 dalam Ardiana, 2003). *Good governance* dapat diartikan juga sebagai kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan yang diambil secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada masyarakat (Wanandi, 1998 dalam Ardiana, 2003). Kondisi seperti ini berarti mendorong pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, tentunya diimbangi dengan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Transfer keuangan juga harus diiringi dengan dengan transfer pegawai pusat menjadi pegawai daerah. Dalam otonomi daerah, yang disebut 3 P (personil, peralatan, dan pembiayaan) secara bersama-sama mesti dilimpahkan ke daerah. Dengan demikian, besarnya pembiayaan disesuaikan dengan besarnya fungsi kewenangan yang dilaksanakan daerah. Guna menjamin sumber pembiayaan tersebut, perlu kesiapan atau profesionalisme aparat-aparat daerah untuk dapat memainkan peran dan orientasinya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dan dana perimbangan yang proporsional (Kustiawan, 2002).

Penelitian yang dilakukan oleh Memen Kustiawan (2002) pada Dispenda Propinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Pemda Jawa Barat untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan bagi APBD adalah dengan meningkatkan jumlah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah. Akan tetapi hendaknya diperhatikan apakah peningkatan pendapatan tersebut tidak memunculkan masalah baru akibat reaksi masyarakat yang tentunya tidak akan menyetujui adanya kenaikan tersebut. Selain itu, penelitian yang dilakukan Memen Kustiawan (2002) juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap rumusan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap dana alokasi umum melalui Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2000.

Dapat terlihat misalnya, pemerintah daerah Jember melakukan protes karena kecilnya dana alokasi umum yang mereka terima, yaitu sebesar 300 milyar, padahal kebutuhan belanja pegawai mereka saja diperkirakan 275 milyar, yang artinya dana alokasi umum tersebut hanya cukup untuk kebutuhan belanja pegawai saja. Pemerintah daerah Bekasi juga melakukan protes kepada Depdagri karena hanya menerima sebesar 184,7 milyar, padahal mereka mengharapkan akan menerima sebesar 250 milyar - 800 milyar. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan pendelegasian dalam perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber yang ada di daerah untuk digunakan sebagai sumber pembangunan di daerah. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, jelas bahwa kesiapan dan profesionalisme pemerintah daerah mutlak diperlukan.

Dalam Hariian Umum Republika taanggal 25 Maret 2000, Sekretaris Dirjen Pemerintah Umum dan Daerah (PUMDA) Depdagri dan Otonomi Daerah, Sudarsono mengatakan bahwa :

Rumusan tersebut merupakan rumusan baku untuk perhitungan dana alokasi umum, tetapi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) akan melakukan evaluasi ulang atas penetapan dana alokasi umum tadi.

Ternyata, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah benar-benar melakukan evaluasi ulang mengenai rumusan perhitungan dana alokasi umum pada Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2001. Atas usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, akhirnya pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 dan dituangkan pada Peraturan Pemerintah No.84 Tahun 2001. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2001 menggantikan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000. Dalam perjalannya selama 4 (empat) tahun, Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2001 kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dan berlaku sampai saat ini.

Kemudian penelitian yang dilakukan Yuyun Ardiyana (2004) pada Dispenda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa pemerintah daerah DIY mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- 1) intensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan pendapatan yang sudah ada, seperti pajak dan retribusi daerah.
- 2) ekstensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru, seperti penanganan kendaraan bermotor non AB yang beroperasi di Yogyakarta lebih dari 3 (tiga) bulan

dengan cara mengeluarkan tanda bukti berupa kartu identitas KBM musiman.

Selain mengoptimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga masih mengharapkan sumber lain, yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari :

- 1) dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta dari sumber daya alam yaitu dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambanggas bumi, dan pertambangan panas bumi.
- 2) dana alokasi umum; dan
- 3) dana alokasi khusus.

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah yang satu dengan lainnya. Namun, yang menjadi permasalahannya sekarang, apakah pemerintah daerah telah merasa bahwa perhitungan dana alokasi umum dengan menggunakan rumus dalam PP No. 55 Tahun 2005 (pengganti PP No.84 Tahun 2001) telah memenuhi aspirasi daerahnya? Dan pada pelaksanaan otonomi daerah ini, pemerintah daerah memegang peranan yang vital dalam perencanaan pembangunan, pengalokasian dan pengelolaan sumber-sumber yang ada di daerah. Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di Indonesia pun memiliki kewajiban dan tantangan yang sama. Melalui Diras Pendapatan Daerah

sebagai ujung tombak pelaksana, diharapkan menjadi sentral informasi mengenai penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan sumber penerimaan daerah yang lain.

Untuk penelitian terdahulu, dikarenakan terbatasnya waktu, maka dalam mengukur efektivitas dan efisiensi dari usaha Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak hanya menggunakan *Tax Ratio*. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba mengangkat rasio kepatuhan wajib pajak yang belum digunakan pada penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti juga mencoba mengangkat rasio efektivitas pendapatan asli daerah untuk menganalisis upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Wonogiri.

Melihat penjabaran latar belakang yang sedemikian rupa, maka tidaklah bijak jika pemaparan ini tidak berujung pada sebuah judul. Untuk itu penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri) "**

1.2 Pokok Masalah

Pokok masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya?
- 2) Apakah perumusan perhitungan dana alokasi umum yang terdapat dalam PP No. 55 Tahun 2005 telah memenuhi aspirasi Kabupaten Wonogiri dan proporsional?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini menitikberatkan pada peran dan orientasi Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatnya mengenai formula dana alokasi umum (DAU). Pemerintah daerah yang akan diteliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dengan memfokuskan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri.

1.4 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dan upaya perbaikan perumusan dana alokasi umum (DAU) sehingga memenuhi aspirasi daerah. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi adalah untuk :

- 1) Mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.
- 2) Mengetahui sejauh mana perumusan perhitungan Dana Alokasi Umum yang terdapat dalam PP No. 55 Tahun 2005 telah memenuhi aspirasi daerah Kabupaten Wonogiri atau tidak

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat digunakan sebagai acuan dan referensi awal untuk melakukan penelitian selanjutnya bagi para peneliti di bidang otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 2) Diharapkan berguna untuk memperluas cakrawala dan tambahan informasi bagi para akademisi guna menemukan dimensi-dimensi baru dalam bidang ilmu keuangan daerah khususnya PAD dan DAU
- 3) Diharapkan akan membuka wawasan baru bagi aparat daerah sekaligus sebagai aspek guna laksana maupun masyarakat, berkenaan dengan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai masukan berharga untuk perumusan ulang kebijakan yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan lain yang lebih adil sehingga tercipta keselarasan.

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi dari penelitian ini meliputi :

1.6.1 Data yang Dibutuhkan

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :

1.6.1.1 Data Umum

Data umum yang dibutuhkan adalah :

- 1) tugas pokok dan fungsi Dispenda Wonogiri
- 2) struktur organisasi Dispenda Wonogiri
- 3) visi, misi, dan arah kebijakan Dispenda Wonogiri
- 4) prioritas Dispenda Wonogiri.

1.6.1.2 Data Khusus

Data khusus yang dibutuhkan adalah :

- 1) APBD Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2003 s/d 2006
- 2) Dana alokasi umum (DAU)

- 3) Produk domestik regional bruto (PDRB)

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- 1) Metode survai dengan mencari informasi faktual secara mendetail serta melihat gejala yang ada, justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung, dan membuat komparasi serta evaluasi. Pendekatan metodologis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai secara kausal komparatif yang bersifat *ex post facto*, yaitu karena analisis diproses berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan secara empiris pada Dinas Pendapatan Kabupaten Wonogiri. Data yang diperoleh, setelah diolah dan diedit merupakan bahan untuk melakukan analisis deskriptif.
- 2) Wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Wonogiri, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah dan apakah perumusan formula perhitungan dana alokasi umum yang terdapat dalam PP No. 55 Tahun 2005 adalah sudah tepat atau masih kurang.
- 3) Studi pustaka dengan mendapatkan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.3 Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah :

- 1) menghitung *tax ratio*, rasio kepatuhan wajib pajak, rasio efektivitas pendapatan asli daerah,
- 2) menghitung persentase masing-masing pos dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari total pendapatan,
- 3) menghitung kontribusi masing-masing pos dari pendapatan asli daerah dan pos dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,
- 4) menghitung pertumbuhan masing-masing pos dari pendapatan asli daerah dalam APBD.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, pokok masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini menyajikan tinjauan teoritis mengenai penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pada era otonomi daerah, elemen-elemen penerimaan daerah, APBD dalam era otonomi daerah, prinsip-prinsip manajemen daerah, dan optimalisasi PAD.

Bab III : Tinjauan Obyek Penelitian

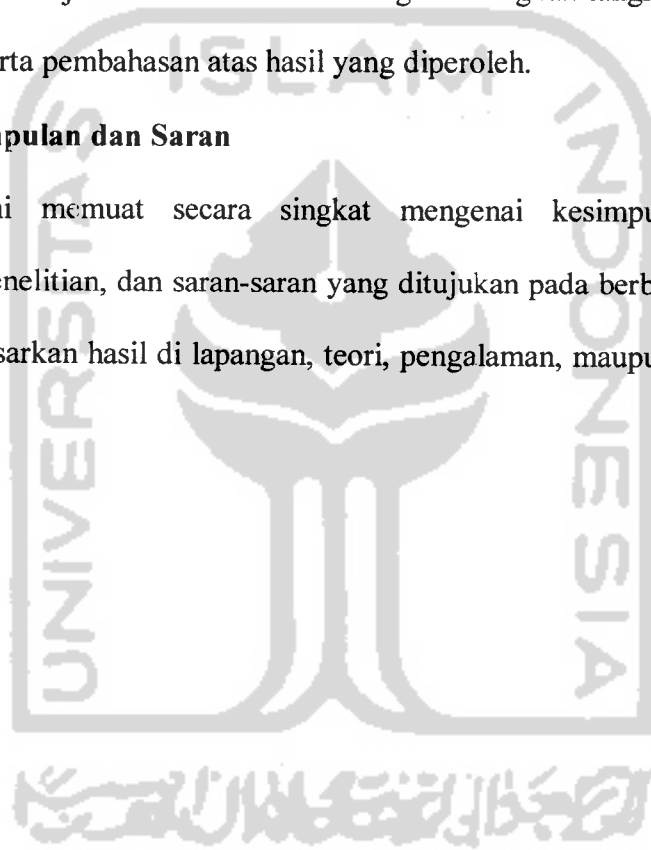
Bab ini menguraikan mengenai data umum dan data khusus yang digunakan dalam obyek penelitian.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah analisis data dan hasilnya serta pembahasan atas hasil yang diperoleh.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat secara singkat mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang ditujukan pada berbagai pihak yang tentunya berdasarkan hasil di lapangan, teori, pengalaman, maupun pertimbangan penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2005 Serta Penyelenggaraan Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004

2.1.1 Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2005

Pelaksanaan otonomi daerah telah memasuki tahapan baru setelah dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah menilai perlu adanya perubahan Undang-undang mengenai Pemerintah Daerah karena UU No. 22 tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Antony Mecca, Direktur Otonomi Pusat dan Pemerintah Daerah Depdagri dan Reffa Riana, Wartawan *Pikiran Rakyat*, Sekretaris Ditjen Otda, Ir. Triyuni Soemartono berbicara mengenai "roh" dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya setelah adanya tuding bahwa pemerintah akan melakukan resentralisasi kembali. Menurutnya, dalam Undang-undang tersebut kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tetap dilaksanakan dan tidak ada maksud untuk melakukan resentralisasi:

" Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan saat ini yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan."

Tri menambahkan, pemerintah juga tidak lupa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pengembangan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan NKRI :

"Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, diselenggarakan secara proporsional sehingga saling menunjang,"

Dalam UU No. 32 tahun 2004 juga disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu.

Terlepas dari adanya kontroversi yang ada, dalam UU No. 32 tahun 2004 terlihat adanya semangat untuk melibatkan partisipasi publik. Di satu sisi, pelibatan publik (masyarakat) dalam pemerintahan atau politik lokal mengalami peningkatan luar biasa dengan diaturnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Dari anatomi tersebut, jelaslah bahwa revisi yang dilakukan terhadap UU No. 22 tahun 1999 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sekilas UU No. 32 tahun 2004 masih menyisakan banyak kelemahan, tapi harus diakui pula banyak peluang dari UU tersebut untuk menciptakan *good governance*, paling tidak di tataran konseptual.

Kondisi yang diharapkan terjadi dalam era otonomi daerah adalah adanya perubahan secara bertahap bagi daerah yang bermula dan berupaya mengurangi ketergantungan dengan pusat, menuju kemandirian daerah yang pada akhirnya mencapai bentuk ideal berupa saling ketergantungan antara pusat dan daerah. Kondisi ideal demikian merupakan cita-cita negara yang dibangun di atas kebhinekaan yang diwujudkan sebagai negara kesatuan. Konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari akibat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat (*power sharing*) kepada provinsi, kabupaten, dan kota, harus diikuti dengan pembiayaan. Artinya, besar pembiayaan disesuaikan dengan besarnya fungsi kewenangan yang dilaksanakan daerah (Mardiasmo, 2001).

Belum ada satu tahun pelaksanaannya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi karena dalam UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur antisipasi keadaan genting yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Gangguan lainnya yang dapat berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dapat berupa belum tersedianya dana, perlengkapan, personil, atau keadaan wilayah pemilihan. Ini merupakan langkah antisipasi pemerintah untuk mewujudkan otonomi daerah

yang adil dan merata dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemudian, penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diperkuat dengan keluarnya UU No. 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2004. Dalam aplikasinya, otonomi daerah menganut beberapa asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan yang akan dibahas pada bagian hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada era otonomi daerah

2.1.1.1 Prinsip Penyelenggaraan Pemda

Sebenarnya, masalah desentralisasi pada akhirnya akan bermuara pada masalah perimbangan keuangan yang merupakan sumber penggerak roda pemerintahan daerah. Prinsip otonomi dan kesatuan bangsa serta implikasinya bagi pemerataan pembangunan harus merupakan dasar pertimbangan bagi penyusunan perimbangan keuangan dan pembagian wewenang. Prinsip otonomi memberi wewenang kepada daerah untuk mengurus daerahnya dengan mengandalkan sebagian besar pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dari sumber keuangannya sendiri, disamping hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Masing-masing daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda, baik sumber daya alamnya maupun tingkat kecerdasan sumber daya manusianya, sehingga mengakibatkan daerah yang kaya bertambah kaya dan sebaliknya daerah miskin menjadi lebih miskin atau dapat disimpulkan bahwa masalah perimbangan keuangan pusat-daerah merupakan masalah yang sarat dengan muatan

ketatanegaraan, politik, sosial budaya, ekonomi, dan administrasi negara secara keseluruhan. Dengan diberlakukannya undang-undang tentang pemerintah daerah dan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan akan memecahkan permasalahan perimbangan keuangan pusat-daerah. Walaupun beberapa pihak masih belum puas, karena masih ada tuntutan yang menyebutkan bahwa formula alokasi daerah otonom tersebut belum mencerminkan keuangan yang lebih menjamin efisiensi dan keadilan serta belum memperhatikan implikasi kebijakan yang akan ditimbulkan. (Kustiawan, 2002)

Prinsip pemberian otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 yakni:

- 1) kewenangan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab bagi daerah kota/kabupaten. Untuk daerah kota/kabupaten, kewenangan yang luas memiliki makna sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali beberapa bidang yang diurus pusat. Kewenangan itu dimiliki kota/kabupaten secara utuh dan bulat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Otonomi yang nyata artinya keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan seras tumbuh, hidup dan berkembang di daerah tersebut. Artinya kewenangan akan suatu urusan harus datang dari inspirasi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk

tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam rangka pencapaian tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI;

- 2) otonomi yang terbatas untuk daerah propinsi, yakni propinsi hanya sebagai pengawas kota/kabupaten dibawahnya, tidak turut campur tangan.

2.1.1.2 Keuangan Daerah

Dalam melaksanakan pemerintahannya, pemerintah daerah membutuhkan anggaran sebagai pendukung utama kegiatan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa:

- 1) kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan;

- 2) kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya;
- 3) hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menetapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.

2.1.2 Penyelenggaraan Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah-daerah propinsi dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai kewajiban dalam mengurus pemerintahannya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat. Pada perjalannya tiap daerah membutuhkan anggaran belanja yang disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Adanya otonomi daerah membuat beberapa tugas pemerintah pusat diserahkan pada pemerintah daerah. Dengan demikian ada pula sebagian pendanaan yang diserahkan pada pemerintah daerah. Untuk itu perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 tahun 1999.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban 3 (tiga) fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya efektif dan lebih tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah. Yang lebih mengetahui kondisi, situasi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pendanaan dalam kaitannya yang menjadi kewenangan daerah, menggunakan APBD sebagai sumbernya, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dibiayai dari APBN, baik yang didekonsentrasikan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

2.2 Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Era Otonomi Daerah

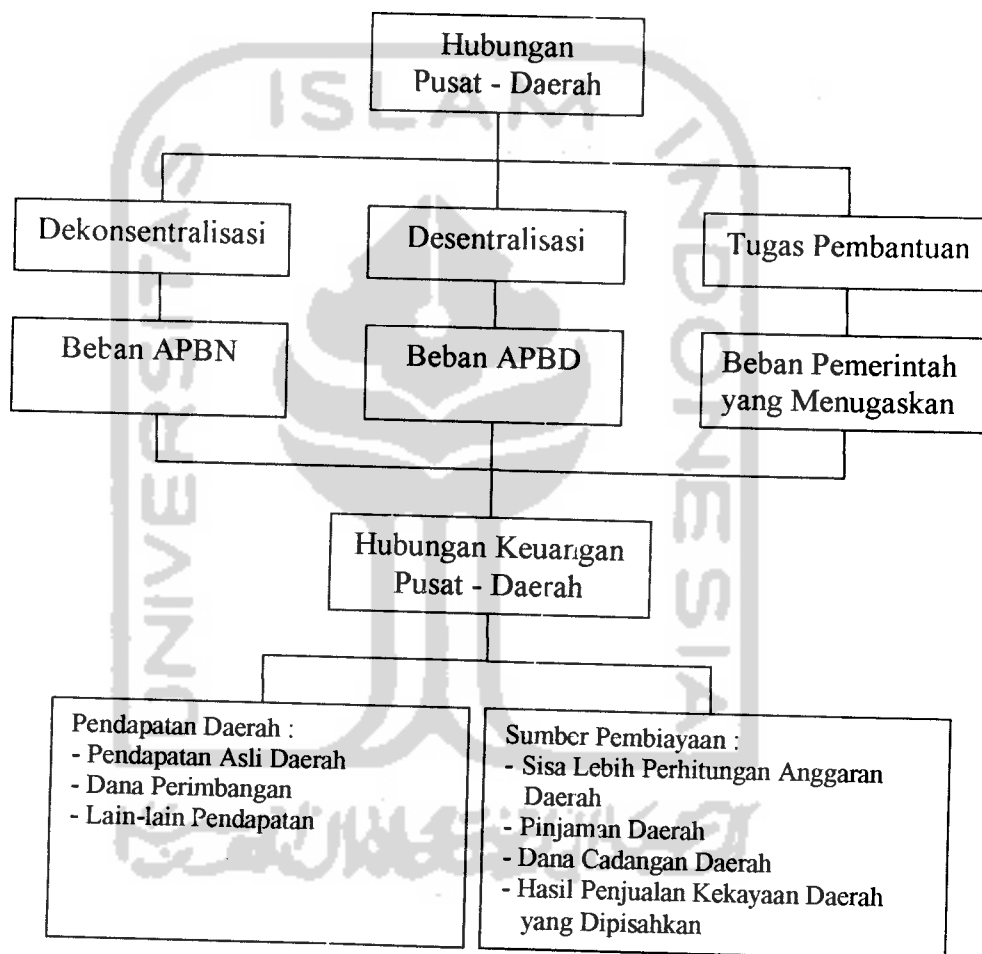
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pendelegasian yang utuh dan bulat dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adanya pergeseran wewenang pada era otonomi ini secara perlahan akan menggeser perkembangan dan pembangunan nasional di masa depan ke daerah-daerah. Penyebaran hasil pembangunan pun akan secara tidak langsung ikut tersebar ke daerah. Harapan ideal inilah yang menjadi tujuan otonomi daerah.

Pada prinsipnya, hubungan fungsi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu: prinsip desentralisasi, prinsip dekonsentrasi, dan prinsip tugas pembantuan. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Ketiga prinsip tersebut juga melandasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta di evaluasi dengan menerapkan analisis varian terhadap anggaran dan realisasi anggaran yang sesungguhnya

(Mardiasmo, 2001). Secara umum, hubungan tersebut digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
HUBUNGAN PUSAT-DAERAH



Sumber: UU No. 32 tahun 2004 dalam Mardiasmo, 2004, diolah

Adanya kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendelegasikan wewenangnya kepada daerah guna mengoptimalkan potensi daerah, namun dalam implementasinya banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Memang, untuk mendapatkan hasil yang optimal dibutuhkan

perjuangan bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

2.3 Elemen-elemen Penerimaan Daerah

Sumber-sumber penerimaan daerah guna pelaksanaan desentralisasi menurut pasal 5 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah yang dimaksud adalah :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan;
- c. lain-lain pendapatan.

Sedangkan sumber dari pembiayaan sebagaimana dimaksud adalah :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- b. penerimaan pinjaman daerah;
- c. dana cadangan daerah;
- d. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, terutama pada dana alokasi umum. Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama dalam pelaksanaan desentralisasi, sedangkan dana perimbangan dan pendapatan ataupun penerimaan lainnya merupakan pendukung dari pendapatan asli daerah.

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan asli daerah berasal dari:

- 1) pajak daerah;

- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain PAD yang sah.

Adapun yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah:

- 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) jasa giro;
- 3) pendapatan bunga;
- 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- 5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

Menurut Pasal 1 point 6 dan 26 UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

" Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan."

Sesuai Pasal 158 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-undang. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Perda dan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan. Baik pajak daerah maupun retribusi yang dilaksanakan oleh daerah adalah pungutan yang sesuai UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No.	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah	Tarif Tertinggi
1.	<p>Pajak Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di atas Air c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan e. Pajak Hotel f. Pajak Restoran g. Pajak Hiburan h. Pajak Reklame i. Pajak Penerangan Jalan j. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C k. Pajak Parkir <p>Catatan :</p> <p>Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan tersebut di atas, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak pusat e. Potensinya memadai f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat h. Menjaga kelestarian lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> 5% 5% 10% 5% 20% 10% 10% 35% 25% 10% 20% 20%

<p>2. Retribusi :</p> <p>1. Jasa Umum, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kesehatan b. pelayanan persampahan <p>Yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan</p> <p>2. Jasa Usaha, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah b. penyediaan tempat penginapan c. usaha bengkel kendaraan d. tempat pencucian mobil e. penjualan bibit <p>3. Perizinan Tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. izin mendirikan bangunan b. izin peruntukan penggunaan tanah <p>Catatan :</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan 2) Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak 3) Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pembiayaan izin yang bersangkutan 	
--	--

Sumber: UU No. 34 Tahun 2000, diolah

2.3.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun yang dimaksud dengan dana perimbangan menurut Pasal 10 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- 1) dana bagi hasil;

- 2) dana alokasi umum; dan
- 3) dana alokasi khusus.

Berikut adalah ikhtisar dana perimbangan pusat-daerah berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam tabel 2.2

TABEL 2.2
IKHTISAR DANA PERIMBANGAN PUSAT-DAERAH

No.	Jenis Bantuan	Pusat (%)	Daerah (%)	
			Prov	Kab/Kota
1.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*1)	10	16,2	64,8
2.	BPHTP	20	16	64
3.	PPh Pasal 21, 25, dan 29	80	8	12
4.	Sumber Daya Alam :			
	a. Kehutanan			
	• Iuran hak pengusahaan hutan	20	16	64
	• Provisi sumber daya alam*2)	20	16	64
	• Dana Reboisasi*3)	60	-	40
	b. Pertambangan umum			
	• Iuran tetap	20	16	64
	• Iuran eksplorasi dan eksploitasi*4)	20	16	64
	• Iuran eksplorasi dan eksploitasi*4)	20	-	80
	c. Perikanan*5)	84,5	3	12
	d. Minyak bumi*6)	69,5	6	24
	e. Gas bumi*7)	20	16	32
	f. Panas bumi*8)			
5.	Dana Alokasi Umum	-	10	90
6.	Dana Alokasi Khusus	60	40	

Catatan :

- 1) Sebesar 9% sisanya untuk biaya pemungutan.
- 2) Sebesar 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk daerah lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- 3) Sebesar 40% untuk rehabilitasi hutan dan lahan kabupaten/kota penghasil.
- 4) Sebesar 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- 5) Sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

- 6) Sebesar 6% dibagikan kepada kabupaten/kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, sedangkan 0,5% sisanya digunakan untuk alokasi penambah anggaran pendidikan dasar dengan persentase :
- 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
 - 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan
 - 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- 7) Sebesar 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, sedangkan 0,5% sisanya digunakan untuk alokasi penambah anggaran pendidikan dasar dengan persentase :
- 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
 - 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan
 - 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- 8) Sebesar 32% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

Sumber : UU No. 33 Tahun 2004

Adapun besarnya alokasi dana perimbangan (desentralisasi) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2001 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3

ALOKASI DANA DESENTRALISASI DALAM APBN 2001

Alokasi Dana Desentralisasi dalam APBN 2001 (Rp Triliun)	
Total Belanja APBN	315,75
a. Belanja Pemerintah Pusat	234,07
1. Pengeluaran Rutin	190,09
2. Pengeluaran Pembangunan	43,98
b. Dana Perimbangan (Desentralisasi)	81,67
1. Dana Bagi Hasil	20,25
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	60,51
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,9

Sumber: APBN 2001, diolah

2.3.2.1 Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

- 1) pajak bumi dan bangunan (PBB);
- 2) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
- 3) pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.

Dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam adalah:

- 1) kehutanan;
- 2) pertambangan umum;
- 3) perikanan;
- 4) pertambangan minyak bumi;
- 5) pertambangan gas bumi; dan
- 6) pertambangan panas bumi.

2.3.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan pasal 27 UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, besar persentase dana alokasi umum adalah sekurang-kurangnya 26 % (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Dalam pengalokasiannya, dana alokasi umum dibagi berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan

jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Berikut formula dana alokasi umum untuk daerah berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 :

$$DAU = CF + AD$$

Dimana :

DAU	=	Dana Alokasi Umum
CF	=	Celah Fiskal
AD	=	Alokasi Dasar
CF	=	Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Alokasi DAU untuk Provinsi dihitung dengan menggunakan formula:

$$DAU \text{ Provinsi}_i = \text{Bobot Provinsi}_i \times DAU \text{ Provinsi}$$

$$\text{Bobot Provinsi}_i = \frac{CF_{propinsi}}{\sum CF_{propinsi}}$$

Dimana :

$CF \text{ provinsi}$	=	celah fiskal suatu daerah provinsi
$\sum CF \text{ provinsi}$	=	total celah fiskal seluruh provinsi

$$DAU \text{ Kabupaten/Kota}_i = \text{Bobot Kabupaten/Kota}_i \times DAU \text{ Kabupaten/Kota}$$

$$\text{Bobot Kabupaten/Kota}_i = \frac{CF_{kabupaten / kota}}{\sum CF_{kabupaten / kota}}$$

Dimana :

$CF \text{ Kabupaten/Kota}$	=	celah fiskal suatu daerah Kabupaten/Kota
$\sum CF \text{ Kabupaten/Kota}$	=	total celah fiskal seluruh Kabupaten /Kota

Kebutuhan fiskal dihitung dengan menggunakan formula:

Total Belanja Daerah Rata-rata $\times \alpha_1$ indeks jumlah penduduk + α_2 indeks luas wilayah + α_3 indeks kemahalan konstruksi + α_4 indeks pembangunan manusia + α_5 indeks PDRB per kapita

Keterangan :

α_1 , α_2 , α_3 , α_4 , dan α_5 merupakan bobot masing-masing indeks yang ditentukan berdasarkan hasil uji statistik.

Kedua parameter dimaksud digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah dalam rangka pendanaan pelaksanaan Desentralisasi. Semakin kecil nilai indeks, semakin baik tingkat pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

$$\begin{aligned} \text{Total Belanja Daerah} \\ \text{Rata-rata} &= \frac{\text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Barang} + \text{Belanja Modal}}{\text{Jumlah Pr opinsi / Kabupaten Kota}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Jumlah} \\ \text{Penduduk Daerah} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk Daerah}}{\text{Rata - rata Jumlah Penduduk Nasional}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Luas Wilayah Daerah} &= \frac{\text{Luas Wilayah Daerah}}{\text{Rata - rata Luas Wilayah Secara Nasional}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kemahalan} \\ \text{Konstruksi Daerah} &= \frac{\text{Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah}}{\text{Rata - rata Kemahalan Konstruksi Nasional}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Pembangunan} \\ \text{Manusia} &= \frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Daerah}}{\text{Rata - rata IPM Secara Nasional}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks PDRB per Kapita Daerah} &= \frac{\text{PDRB per Kapita Daerah}}{\text{Rata - rata PDRB per Kapita Nasional}} \end{aligned}$$

2.3.2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus dialokasikan tiap tahun dari APBN kepada daerah tertentu untuk pelaksanaan desentralisasi guna mendanai kegiatan khusus yang

ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Menurut pasal 40 UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah menetapkan kriteria dana alokasi khusus berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penjelasan dari ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam APBD;
- 2) kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah;
- 3) kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/Departemen teknis.

2.4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Era Otonomi Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada era otonomi daerah sekarang ini disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dengan begitu akan dapat diukur secara langsung apakah output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan awal dari rencana dengan tidak lupa melihat biaya yang dikeluarkan. Struktur APBD dengan pendekatan kinerja dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

TABEL 2.4
STRUKTUR APBD DENGAN PENDEKATAN KINERJA
PROPINSI / KABUPATEN / KOTA

NO	Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	PENDAPATAN		Rp	Rp
1	Pendapatan Asli Daerah		Rp	Rp
	Pajak Daerah	Rp		
	Retribusi Daerah	Rp		
	Bagian Laba Usaha Daerah	Rp		
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp		
2	Dana Perimbangan		Rp	Rp
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp		
	Dana Alokasi Umum	Rp		
	Dana Alokasi Khusus	Rp		
	Dana Perimbangan dari Propinsi*)	Rp		
3	Lain-lain Pendapatan yang sah		Rp	Rp
	<i>Jumlah Pendapatan</i>		Rp	Rp
II	BELANJA		Rp	Rp
1	APARATUR NEGARA		Rp	Rp
1	Belanja Administrasi Umum		Rp	Rp
	Belanja Pegawai/Personalia	Rp		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp		
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp		
	Belanja Pemeliharaan	Rp		
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan		Rp	Rp
	Belanja Pegawai/Personalia	Rp		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp		
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp		
	Belanja Pemeliharaan	Rp		
3	Belanja Modal/Pembangunan		Rp	Rp
2	PELAYANAN PUBLIK		Rp	Rp
1	Belanja Administrasi Umum		Rp	Rp
	Belanja Pegawai/Personalia	Rp		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp		
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp		
	Belanja Pemeliharaan	Rp		
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan		Rp	Rp
	Belanja Pegawai/Personalia	Rp		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp		
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp		
	Belanja Pemeliharaan	Rp		
3	Belanja Modal/Pembangunan		Rp	Rp
3	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN		Rp	Rp
4	BELANJA TIDAK TERSANGKA		Rp	Rp
	<i>Jumlah Belanja</i>		Rp	Rp
	<i>Surplus/(Defisit)</i>		Rp	Rp
III	PEMBIAYAAN		Rp	Rp
1	Penerimaan Daerah		Rp	Rp
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp		
	Transfer dari Dana Cadangan	Rp		
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp		
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	Rp		
	<i>Jumlah Penerimaan Daerah</i>		Rp	Rp

	2	Pengeluaran Daerah		Rp	Rp
		Transfer ke Dana Cadangan	Rp		
		Penyertaan Modal	Rp		
		Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp		
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sekarang	Rp		
		<i>Jumlah Pengeluaran Daerah</i>		Rp	Rp
		<i>Jumlah Pembiayaan</i>		Rp	Rp

*) Untuk Kabupaten / Kota

Sumber: Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi dalam Mardiasmo (2002)

Dalam struktur APBD yang baru, Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dan Pinjaman (Utang) tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah, namun dimasukkan sebagai pembiayaan daerah. Dengan struktur baru tersebut akan lebih mudah mengetahui surplus atau defisit, sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat (publik). Jika terjadi defisit anggaran, maka untuk menutupnya disediakan pos “pembiayaan”. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pemerintah daerah juga dimungkinkan untuk membentuk dana cadangan. Dengan demikian, anggaran tidak harus dihabiskan selama tahun anggaran bersangkutan, namun bisa ditransfer ke dalam dana cadangan. Struktur APBD dengan pendekatan kinerja tersebut diharapkan mampu memfasilitasi terciptanya *good governance* di daerah. (Mardiasmo, 2002)

2.5 Prinsip-prinsip Manajemen Penerimaan Daerah

Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah tidak perlu membuat dikotomi antar pendapatan asli daerah dengan dana alokasi umum. Pemerintah daerah memiliki kewenanga yang penuh untuk menggunakan kedua sumber penerimaan tersebut (Mardiasmo,2002). Untuk itu dibutuhkan aparat-aparat

daerah yang memiliki kesiapan dan profesionalisme yang tinggi agar mampu mengelola daerah dengan optimal. Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian manajemen yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Kustiawan, 2002). Pemerintah daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas pemerintah daerah dan disalahgunakan oleh petugas di lapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan pemberian sanksi atas tindakan penggelapan pajak.

Selain itu perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi namun ditingkatkan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sementara itu, peningkatan prosedur pengendalian dimaksudkan untuk pengendalian internal pemerintah daerah agar terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi (Mardiasmo, 2002).

2.6 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah hendaknya tidak disalahartikan untuk mengeksploitasi sebanyak-banyaknya sumber pendapatan baru dalam mengejar pendapatan asli daerah sebanyak-banyaknya. Pada era otonomi, pemerintah daerah harus mampu memainkan perannya untuk dapat

mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Cara itu dimungkinkan yaitu melalui penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah seharusnya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi yaitu dengan jalan meningkatkan *tax ratio*-nya, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan penerimaan domestik regional bruto (PDRB). Dengan demikian pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah tersebut, jangan sampai malah mendapatkan tanggapan negatif dari masyarakat di daerahnya. Jadi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah tergantung pada kejelian Kepala Daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki serta kualitas anggota legislatif yang mengontrol jalannya pembangunan (Kustiawan, 2002).

Menurut pasal 7 UU No. 33 tahun 2004, dalam upayanya meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dilarang:

- 1) menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- 2) menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Dalam penetapan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, yang dimaksud adalah pengaturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan propinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

Contoh dari pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan ekspor/impor antara lain adalah retribusi izin masuk kota, pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Kemudian penelitian yang dilakukan Yuyun Ardiyana (2004) pada Dispenda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa pemerintah daerah DIY mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- 1) Intensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan pendapatan yang sudah ada, seperti pajak dan retribusi daerah.
- 2) ekstensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru, seperti penanganan kendaraan bermotor non AB yang beroperasi di Yogyakarta lebih dari 3 (tiga) bulan dengan cara mengeluarkan tanda bukti berupa kartu identitas KBM musiman.

Selain itu, Pemda DIY juga menyatakan tidak puas terhadap perumusan dana alokasi umum yang dibagikan karena dana yang ada hanya dapat digunakan untuk belanja pegawai saja, hanya sedikit yang dapat digunakan untuk belanja pembangunan.

BAB III

TINJAUAN OBYEK PENELITIAN

3.1 Data

3.1.1 Data Umum

Data-data umum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu :

3.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kabupaten Wonogiri

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan daerah.

2) Fungsi :

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah, dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pendapatan daerah.

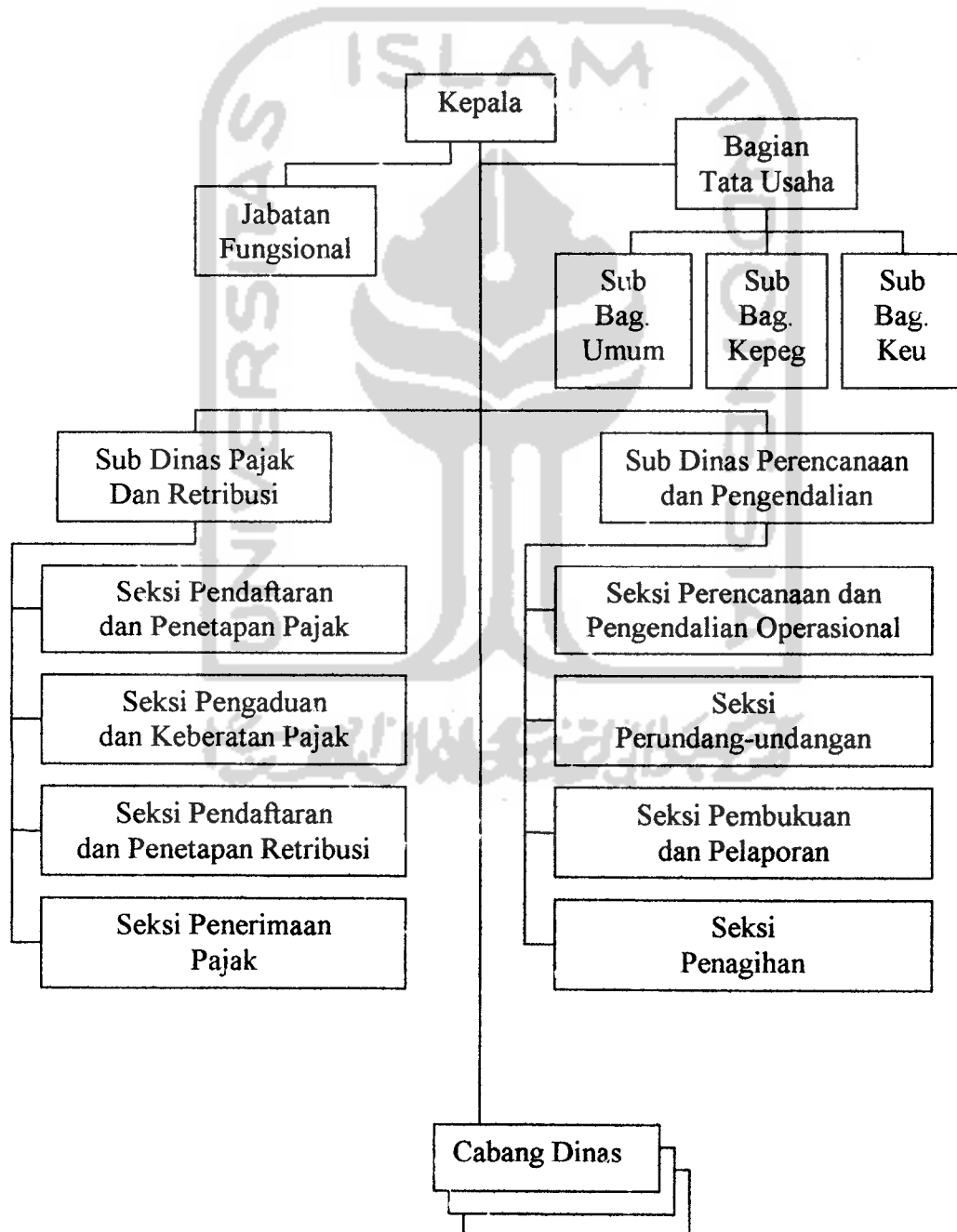
3.1.1.2 Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Wonogiri

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah, mempunyai struktur organisasi yang tertera pada gambar 3.1 berikut:

GAMBAR 3.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DISPENDA KABUPATEN WONOGIRI**



3.1.1.3 Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Dispenda Kabupaten Wonogiri

1) Visi

Visi Dispenda Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut: "terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah pada setiap tahun anggaran"

2) Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Dispenda Kabupaten Wonogiri menetapkan misi sebagai berikut:

- a) Menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan pendaftaran, pendataan, penetapan, penyeteroran pembukuan dan pelaporan untuk setiap obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan; dan merencanakan serta merealisasikan peningkatan pendapatan asli daerah secara terukur dan rasional untuk setiap sumber pendapatan asli daerah
- b) Meningkatkan sumber daya manusia dan pelayanan dengan meningkatkan kinerja Dispenda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan meningkatkan pelayanan di bidang pendapatan daerah.

3) Arah Kebijakan

Adapun arah kebijakan Dispenda Kabupaten Wonogiri yaitu:

- a) Intensifikasi pendapatan asli daerah
- b) Ekstensifikasi pendapatan asli daerah

- c) Peningkatan pengawasan terhadap pengadaan, pengambilan dan penggunaan benda-benda berharga sebagai alat pungut pendapatan asli daerah
- d) Menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah

3.1.1.4 Prioritas Dispenda Wonogiri

Beberapa prioritas Dispenda Kabupaten Wonogiri selama 5 (lima) tahun (dari tahun 2006 sampai dengan 2010) adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 2) Meningkatkan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah secara terus menerus
- 3) Meningkatkan kesadaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dengan cara penyuluhan/sosialisasi
- 4) Meningkatkan pemahaman sistem dan prosedur pengelola pendapatan asli daerah

3.1.2 Data Khusus

Adapun data khusus yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu :

3.1.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri

Kemampuan keuangan daerah amat menentukan dan juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah tentunya tertuang dalam APBD masing-masing daerah. Begitupun Kabupaten Wonogiri, kemampuan keuangan daerahnya tertuang dalam APBD Kabupaten

Wonogiri. Dalam era otonomi daerah, APBD disusun dengan pendekatan kinerja dengan aspek-aspeknya sebagai berikut :

- 1) Pendapatan, yang terdiri dari :
 - a) Pendapatan asli daerah
 - b) Dana perimbangan
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah
- 2) Belanja, yang terdiri dari :
 - a) Belanja aparatur negara
 - b) Belanja pelayanan publik
 - c) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
 - d) Belanja tidak tersangka
- 3) Pembiayaan, yang terdiri dari :
 - a) Penerimaan daerah
 - b) Pengeluaran daerah

Sebenarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja sudah berlaku sejak dimulainya otonomi daerah yaitu mulai tahun anggaran 2001, namun karena berbagai kendala yang terjadi di lapangan, Kabupaten Wonogiri baru mulai menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan pendekatan kinerja mulai tahun anggaran 2003 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2003. Berikut ini ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri dari tahun anggaran 2003 s/d 2006 yang tersaji dalam tabel 3.1 :

TABEL 3.1

**RINGKASAN APBD KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2003 – 2006**

No	Uraian	2003	2004	2005	2006
I	PENDAPATAN				
	1. Pendapatan Asli Daerah	26.118.679.231	29.485.853.376	33.378.891.263	39.627.599.307
	2. Dana Perimbangan	351.778.809.684	370.668.045.372	391.333.457.722	570.077.923.836
	3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	26.200.794.000	24.026.354.000	24.669.920.000	0
	Jumlah Pendapatan	404.098.282.515	424.180.252.748	449.382.268.985	609.705.523.143
II	BELANJA				
	1. Belanja Aparatur Negara	92.438.465.383	100.278.649.602	100.318.233.555	
	2. Belanja Pelayanan Publik	311.154.903.694	321.745.434.000	340.541.983.358	
	3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	-	-	-	
	4. Belanja Tidak Tersangka	-	-	-	
	Jumlah Belanja	403.593.369.077	422.024.083.602	440.860.216.913	
	Surplus / (defisit)	504.913.438	2.156.169.146	8.522.052.072	
III	PEMBIAYAAN				
	1. Penerimaan Daerah	54.756.841.330	54.175.950.619	57.957.305.155	
	2. Pengeluaran Daerah	34.600.273.452	56.332.119.765	66.479.357.227	
	Surplus / (defisit)	20.156.567.878	(2.156.169.146)	(8.522.052.072)	

Sumber : APBD Kabupaten Wonogiri 2003 – 2005, Dispenda, diolah

Tabel di atas akan digunakan sebagai dasar perhitungan hal-hal berikut :

1. Persentase pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah dari jumlah total pendapatan APBD;
2. Peran masing-masing pos dalam pendapatan asli daerah dan dana perimbangan;
3. Peran pertumbuhan masing-masing pos dalam pendapatan asli daerah.

Dalam ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri di atas, realisasi pada pos belanja maupun pembiayaan pada 2006 belum dapat ditampilkan karena belum keluarnya data resmi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) tentang pos-pos tersebut, sedangkan untuk pos pendapatan sudah dapat karena data resmi dari Dinas Pendapatan Daerah sudah dapat diakses.

3.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Wonogiri

Dana alokasi umum merupakan dana perimbangan yang berasal dari pusat untuk diperbantukan kepada daerah dengan formula yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005. Alokasi perhitungan untuk masing-masing daerah tentunya berbeda-beda tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi sumber daya alam. Adapun dana alokasi umum yang diterima oleh Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2003 – 2006 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

TABEL 3.2

**PENERIMAAN DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2003 – 2006
(dalam Juta Rupiah)**

	2003	2004	2005	2006
Jumlah DAU	311.090	326.104	336.549	523.439

Sumber : Dispenda Kabupaten Wonogiri, diolah

Tabel di atas akan digunakan sebagai dasar analisis apakah pembagian dana alokasi umum sudah memenuhi aspirasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, tentunya dengan digabungkan bersama wawancara terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

3.1.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wonogiri

Membaiknya kondisi perekonomian ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, yang mana dapat dilihat dari nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin baik pula perekonomian daerah tersebut. Berikut PDRB Kabupaten Wonogiri dari tahun 2003 – 2005 yang tersaji pada tabel 3.3 :

TABEL 3.3

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2003 – 2005
(dalam Juta Rupiah)**

Uraian	2003	2004	2005
Jumlah PDRB	2.807.906,87	3.088.700,62	3.419.195,81

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonogiri

PDRB di atas digunakan sebagai pembagi dalam menghitung *tax ratio*. PDRB yang digunakan yaitu mulai tahun 2003 – 2005, sedangkan untuk PDRB tahun 2006 belum tercatat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Wonogiri.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Survei

Metode survei dengan mencari informasi faktual secara mendetail serta melihat gejala yang ada, justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung, dan membuat komparasi serta evaluasi. Pendekatan metodologis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei secara kausal komparatif yang bersifat *ex post facto*, yaitu karena analisis diproses berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan secara empiris pada Dinas Pendapatan Kabupaten Wonogiri. Data yang diperoleh, setelah diolah merupakan bahan untuk melakukan analisis deskriptif.

3.2.2 Wawancara

Wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Wonogiri, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah dan

wawancara dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk mengetahui apakah perumusan formula perhitungan dana alokasi umum yang terdapat dalam PP No. 55 Tahun 2005 adalah sudah tepat atau masih kurang.

3.2.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dengan mendapatkan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan literatur yang ada.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Menghitung *Tax Ratio*, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

- 1) *Tax Ratio* dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak tahun } n}{\text{PDRB tahun } n}$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Pemda dalam meningkatkan pajak daerahnya, artinya jika *tax ratio* dari tahun ke tahun meningkat berarti Pemda mampu meningkatkan penerimaan pajak daerahnya.

- 2) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang Lunas}}{\text{Surat Ketetapan Pajak Daerah yang Diterbitkan}}$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan pajak daerah. Semakin mendekati 1 (satu) maka semakin baik kepatuhan wajib pajak.

- 3) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasar Potensi Riil}}$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pendapatan asli daerah yaitu kemampuan Pemda untuk merealisasikan pendapatan asli daerahnya dari semula target yang direncanakan berdasarkan potensi riil daerah. Daerah dikatakan efektif jika memiliki rasio minimal sebesar 1 (satu). Jadi semakin tinggi rasio efektivitas, maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

3.3.2 Menghitung Persentase Masing-masing Pos dari Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari Total Pendapatan

- 1) Persentase pendapatan asli daerah dari total pendapatan daerah (derajat desentralisasi) dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

- 2) Persentase dana perimbangan dari total pendapatan daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

- 3) Persentase lain-lain pendapatan yang sah dari total pendapatan daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Lain-lain Pendapatan yang Sah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pos pendapatan yang terbesar dalam APBD sekaligus mengetahui seberapa besar derajat desentralisasi (*degree of fiscal*).

3.3.3 Menghitung Kontribusi Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dan Pos Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

1) Menghitung kontribusi masing-masing pos dalam pendapatan asli daerah

(PAD)

a) Pajak daerah dari total PAD dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total PAD}}$$

b) Retribusi daerah dari total PAD dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total PAD}}$$

c) Hasil Perusda (BUMD) dari total PAD dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Hasil BUMD}}{\text{Total PAD}}$$

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari total PAD dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Lain-lain PAD yang Sah}}{\text{Total PAD}}$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pos PAD yang terbesar dari total PAD dalam APBD.

2) Menghitung kontribusi masing-masing pos dalam dana perimbangan

a) Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

- b) Dana alokasi umum dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

- c) Dana alokasi khusus dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

- d) Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Propinsi dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pos terbesar dari dana perimbangan dalam APBD.

3.3.4 Menghitung Pertumbuhan Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

- 1) Pertumbuhan pajak daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Total Pajak Daerah tahun } n}{\text{Total Pajak Daerah tahun } n-1} \times 100 \%$$

- 2) Pertumbuhan retribusi daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Total Retribusi Daerah tahun } n}{\text{Total Retribusi Daerah tahun } n-1} \times 100 \%$$

- 3) Pertumbuhan hasil Perusda (BUMD) dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Total Hasil BUMD tahun } n}{\text{Total Hasil BUMD tahun } n-1} \times 100 \%$$

- 4) Pertumbuhan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dihitung dengan formula :

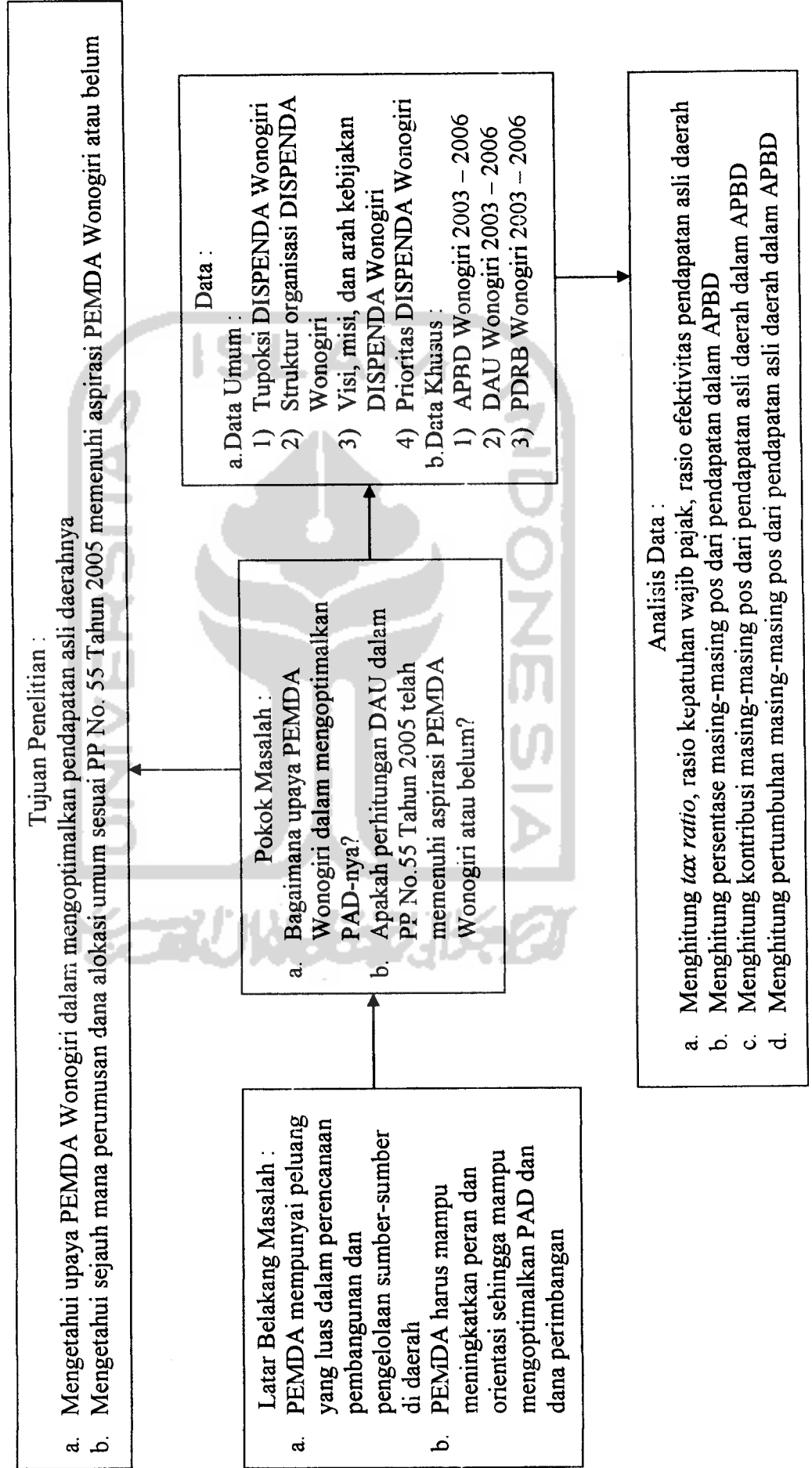
$$\frac{\text{Total Lain-lain PAD yang Sah tahun } n}{\text{Total Lain-lain PAD yang Sah tahun } n-1} \times 100 \%$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pos pendapatan asli daerah mana yang memiliki pertumbuhan terbesar.



GAMBAR 3.2

DESAIN PENELITIAN



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebutuhan tiap daerah berbeda-beda dalam membiayai pembangunan daerah sekaligus menjalankan roda pemerintahannya. Kabupaten Wonogiri membiayai pembangunan daerah dan roda pemerintahannya dengan bertumpu pada sumber pendapatan dan penerimaan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan dari pendapatan asli daerah (PAD)
- 2) Pendapatan dari dana perimbangan
- 3) Pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah
- 4) Penerimaan dari sisa perhitungan anggaran tahun lalu
- 5) Penerimaan dari piutang daerah
- 6) Penerimaan dari penerimaan daerah lainnya

Sebenarnya, secara konsep pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang utama dalam artian terbesar persentasenya, tetapi pada realitanya justru dana perimbangan merupakan sumber terbesar pendapatan daerah. Ini sangat mungkin karena kurangnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri, sehingga pendapatan terbesar Kabupaten Wonogiri berasal dari dana perimbangan.

Sesuai dengan arah kebijakan Dispenda Kabupaten Wonogiri, Kabupaten ini mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Intensifikasi, merupakan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan (mengintensifkan) yang sudah ada. Adapun upaya intensifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Mengadakan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah serta menekan kebocoran. Hal ini telah terbukti dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, yaitu dengan indikasi meningkatnya jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang terbit dari tahun ke tahun, yaitu 187.516 pada 2003, 187.534 pada 2004, 187.549 pada 2005 dan 187.630 pada 2006. Kemudian dalam 1 (satu) tahun terakhir, yaitu pada 2006 telah didata sejumlah 55.652 wajib retribusi yang tersebar di seluruh kabupaten Wonogiri. Lalu untuk menekan kebocoran, dilakukan pengawasan oleh Satuan Kerja Pengelola Pendapatan (SKPP) yang lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
 - b) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat atas pajak-pajak yang selama ini telah memberi kontribusi besar terhadap pendapatan daerah seperti pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C, dan pajak reklame.
 - c) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat atas retribusi-retribusi yang selama ini telah memberi kontribusi besar terhadap pendapatan daerah seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), retribusi izin hasil hutan, serta retribusi pelayanan pasar.

- d) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pajak dan retribusi daerah selain yang disebutkan di atas.
- e) Merumuskan Perda No.9 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Perda No.3 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame. Dimana dalam Perda baru ini dirumuskan tarif baru yaitu 25 % dikali dengan lama pemasangan, jenis reklame, lokasi, dan ukuran reklame. Untuk Perda terdahulu tarifnya sebesar 15 %.
- f) Sedang dibahasnya pembuatan Revisi Perda secara bertahap tentang penyesuaian tarif retribusi yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak mengalami kenaikan tarif seperti retribusi izin usaha angkutan, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini.
- g) Meningkatkan kemampuan manajemen dan pelayanan BUMD. Untuk meningkatkan kemampuan manajemen, dilakukan beberapa kali studi banding guna mendapatkan gambaran bagaimana mereka mengelola BUMD-nya. Pada 2005 dilakukan studi banding ke Kabupaten Kutai Kertanegara. Lalu, pada 2006 dilakukan studi banding ke Kota Malang dan Kota Pekanbaru. Dari hasil studi banding disimpulkan bahwa untuk mampu menciptakan perusahaan daerah yang memiliki daya saing tinggi dibutuhkan profesionalitas manajemen pengelolanya serta kualitas produk yang mampu bersaing di pasaran. Selain itu kerjasama dengan pihak ketiga juga diperlukan. Semua ini tentunya harus didukung dengan promosi yang cukup.

- 2) Ekstensifikasi, merupakan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan yang baru. Adapun upaya ekstensifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a) Sedang dibahas Raperda baru seperti Raperda tentang pajak kepemilikan pesawat televisi perorangan dan Raperda penggunaan listrik di luar PLN. Hal ini dikarenakan selama ini 2 (dua) obyek tersebut memang penggunaannya cukup besar tetapi belum ada kontribusi untuk daerah, sehingga dirancanglah Perda baru untuk kedua obyek tersebut.
 - b) Melakukan kerjasama dengan pemerintah kota Naning, Propinsi Guangzi, Tiongkok dalam ekspor *gaplek/chip* ketela pohon (*cassava chip*) yang ditangani oleh Perusda “Surya” yang tadinya hanya melakukan usaha perbengkelan saja. Oleh pemerintah kota Naning, *gaplek* ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan *bioetanol* dan gula. Dengan begitu nantinya kerjasama ini akan memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

Menurut pengamatan peneliti, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda Wonogiri adalah sudah tepat yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Untuk mengukur apakah upaya yang dilakukan Pemda Kabupaten Wonogiri sudah tepat dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah, dapat digunakan analisis kuantitatif sebagai berikut :

- 1) *Tax Ratio* dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak tahun } n}{\text{PDRB tahun } n}$$

Berikut perhitungan *tax ratio* yang tersaji dalam tabel 4.1 :

TABEL 4.1
TAX RATIO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2003 - 2006

Uraian	2003	2004	2005	2006
Pajak Daerah	5.007.555.185	5.423.593.573	6.219.813.394	6.417.902.875
PDRB	2.807.906.870.000	3.088.700.620.000	3.419.195.810.000	-
Tax Ratio	0,00178	0,00176	0,00182	-

Sumber : Dispenda dan Bcppeda Kabupaten Wonogiri, diolah

Terlihat jelas bahwa pada tahun 2003 Kabupaten Wonogiri memiliki *tax ratio* sebesar 0,00178, kemudian turun di tahun 2004 menjadi sebesar 0,00176, lalu naik kembali pada 2005 menjadi sebesar 0,00182. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2004 Kabupaten Wonogiri belum mampu meningkatkan *tax ratio*-nya jika dibandingkan dengan tahun 2003. Adapun pada tahun 2005 sudah mampu meningkatkan *tax ratio*-nya jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan bukti dari upaya intensifikasi yang dilakukan, yaitu dengan mendata potensi wajib pajak di Kabupaten Wonogiri. Adanya *trend* kenaikan *tax ratio* ini menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pajak daerahnya.

5) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang Lunas}}{\text{Surat Ketetapan Pajak Daerah yang Diterbitkan}}$$

Berikut perhitungan rasio kepatuhan wajib pajak yang tersaji dalam tabel

4.2 :

TABEL 4.2
RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2003 – 2006

Uraian	2003	2004	2005	2006
SKPD Lunas	187.516	187.534	187.549	187.630
SKPD Terbit	187.516	187.534	187.549	187.630
Rasio Kepatuhan	1	1	1	1

Sumber : Dispenda Kabupaten Wonogiri, diolah

Adapun terlihat dalam tabel bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun 2003 s/d 2006 adalah 1, artinya wajib pajak dari pajak daerah yang ada di Kabupaten Wonogiri memang patuh dalam membayar pajak daerah. Dalam realisasinya memang Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan seluruhnya lunas dibayar oleh wajib pajak dengan tepat waktu (tidak terlambat).

- 3) Rasio Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasar Potensi Riil}}$$

Berikut perhitungan rasio efektivitas PAD yang tersaji dalam tabel 4.3 :

TABEL 4.3

**RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2003 – 2006**

Uraian	2003	2004	2005	2006
Realisasi PAD	26.118.679.231	29.254.390.494	33.378.891.263	39.627.599.307
Target PAD	27.433.346.000	31.261.465.650	36.272.329.446	46.346.749.364
Rasio Efektivitas	0,9521	0,9358	0,9202	0,8550

Sumber : Dispenda Kabupaten Wonogiri, diolah

Terlihat dalam tabel bahwa Pemda Kabupaten Wonogiri belum efektif dalam memungut pendapatan asli daerahnya karena nominal rasio efektivitasnya belum mencapai 1 (satu). Bahkan di tiap tahunnya ada penurunan rasio efektivitas dimana sangat signifikan terjadi pada 2006 yaitu dari 0,9202 turun menjadi 0,8550. Hal ini selain dikarenakan pembayaran pajak penerangan jalan untuk rekening bulan Desember dibayar bulan Januari tahun berikutnya (pengakuan basis kas), ada juga pos-pos dalam hasil BUMD yang tidak memberikan sumbangan pendapatan

sebagaimana yang ditargetkan. Sebagaimana yang tertera dalam APBD 2006, pos-pos tersebut adalah dari BPR-BKK dan dividen BPD Jateng. Untuk dividen BPD Jateng memang tidak bisa dibagikan tiap tahun karena bank ini tidak sehat. Direncanakan akan ada penyuntikan modal lagi dari pemerintah propinsi Jawa Tengah sebagai salah satu upaya untuk menyetatkan lagi BPD Jateng yang berkedudukan di Kabupaten Wonogiri.

4) Menghitung Persentase Masing-masing Pos dari Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari Total Pendapatan

a) Persentase pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

b) Persentase dana perimbangan dari total pendapatan daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

c) Persentase lain-lain pendapatan yang sah dari total pendapatan daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Lain-lain Pendapatan yang Sah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

Berikut perhitungan persentase masing-masing pos dari pendapatan dalam APBD yang tertuang pada tabel 4.4 :

TABEL 4.4
PERSENTASE MASING-MASING POS PENDAPATAN DALAM APBD
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2003 – 2006

Uraian	2003	2004	2005	2006
1. PAD	26.118.679.231	29.485.853.376	33.378.891.263	39.627.599.307
2. Dana Perimbangan	351.778.809.684	370.668.045.372	391.333.457.722	570.077.923.836
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	26.200.794.000	24.026.354.000	24.669.920.000	0
4. Total Pendapatan	404.098.282.515	424.180.252.748	449.382.268.985	609.705.523.143
1 : 4 (dalam %)	6,46	6,95	7,43	6,50
2 : 4 (dalam %)	87,05	87,39	87,08	93,50
3 : 4 (dalam %)	6,48	5,66	5,49	0,00

Sumber : Nota Perhitungan APBD Kabupaten Wonogiri dan Dispenda Kabupaten Wonogiri, diolah

Selama 4 (empat) tahun berturut-turut, persentase terbesar dari pos pendapatan adalah dana perimbangan. Berturut-turut dari 2003 s/d 2006 sebesar 87,05; 87,39; 87,08; dan 93,50. Hal ini merupakan fenomena yang terjadi hampir diseluruh Kabupaten-kabupaten di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sebenarnya ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat merupakan sesuatu yang tidak sehat. Betapa tidak? Pendapatan asli daerah yang seharusnya memberi kontribusi terbesar "dikalahkan" oleh dana perimbangan yang notabeneanya merupakan bantuan. Akan tetapi beberapa studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah menimbulkan distorsi pasar dan *high cost economy* (Saad, 2003 dalam Landiyanto, 2005). Selain itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya kurang diikuti dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik (Halim dan Abdullah, 2004 dalam Landiyanto, 2005).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bank Dunia, menyatakan bahwa dalam suatu model pertumbuhan kota yang ideal, perlu ditekankan terhadap upaya peningkatan pelayanan publik, yang berupa (a) tata pemerintahan yang baik akan mendorong manajemen finansial dan penyediaan pelayanan kota yang bermutu tinggi; (b) investor yang tertarik dengan kemajuan tersebut akan merangsang pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang, termasuk masyarakat miskin; (c) pengembangan ekonomi lokal akan menguatkan keuangan daerah dan membantu mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja; dan (d) posisi fiskal yang kuat akan meningkatkan layanan kota dan membuat siklus pengembangan terus bergerak maju (World Bank, 2003b dalam Landiyanto, 2005)

Kemudian pada analisis ini, jika kita lihat kontribusi PAD terhadap total pendapatan berturut-turut sebesar 6,46 % pada 2003, 6,95 % pada 2004, 7,43 % pada 2005, dan 6,45 % pada 2006. Jika ini dibandingkan dengan rata-rata derajat desentralisasi Indonesia yaitu 7,12 % pada 2003 dan 7,73 % pada 2004 (Dewi, 2007), maka terlihat bahwa Kabupaten Wonogiri masih berada di bawah rata-rata tersebut. Jadi kemampuan menyelenggarakan desentralisasi Kabupaten Wonogiri masih di bawah rata-rata kemampuan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata derajat desentralisasi untuk daerah yang derajat desentralisasinya rendah (Kabupaten Wonogiri termasuk daerah yang derajat desentralisasinya rendah) yaitu 4,03 % pada 2003 dan 4,29 % pada 2004, maka Kabupaten Wonogiri masih di atas rata-ratanya.

- 5) Menghitung Kontribusi Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dan Pos Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- a) Menghitung kontribusi masing-masing pos dalam pendapatan asli daerah (PAD)

1. Pajak daerah dari total PAD dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total PAD}}$$

2. Retribusi daerah dari total PAD dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total PAD}}$$

3. Hasil Perusda (BUMD) dari total PAD dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Hasil BUMD}}{\text{Total PAD}}$$

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari total PAD dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Lain-lain PAD yang Sah}}{\text{Total PAD}}$$

Berikut perhitungan kontribusi masing-masing pos pendapatan asli daerah yang tertuang dalam table 4.5 :

TABEL 4.5

**KONTRIBUSI MASING-MASING POS DALAM
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2003 – 2006**

No	Uraian	2003	2004	2005	2006
1.	Pajak Daerah	5.007.555.185	5.635.354.126	5.281.804.117	6.417.902.875
2.	Retribusi Daerah	12.833.745.739	16.203.778.646	17.041.914.486	19.002.419.419
3.	Hasil BUMD	1.748.449.273	1.472.764.264	5.763.745.389	1.836.783.609
4.	Lain-lain PAD yang Sah	6.528.928.634	6.173.956.340	5.291.427.271	12.370.772.058
5.	Total PAD	26.118.678.831	29.485.853.376	33.378.891.263	39.627.599.307
6.	1 : 5 (dalam %)	19,17	19,11	15,82	16,20

7.	2 : 5 (dalam %)	49,14	54,95	51,06	47,95
8.	3 : 5 (dalam %)	6,69	4,99	17,27	4,63
9.	4 : 5 (dalam %)	25,00	20,95	15,85	31,22

Sumber : Nota Perhitungan APBD Kabupaten Wonogiri dan Dispenda Kabupaten Wonogiri, diolah

Seperti yang terlihat di tabel 4.5 kontribusi terbesar pos-pos dalam pendapatan asli daerah adalah pos retribusi daerah yaitu 49,14 % pada tahun 2003, 54,95 % pada tahun 2004, 51,06 % pada 2005, dan 47,95 % pada 2006. Berturut-turut setelah retribusi daerah yaitu lain-lain PAD yang sah, pajak daerah, dan hasil BUMD (pada 2003, 2004, dan 2006) dan lain-lain PAD yang sah, hasil BUMD, serta pajak daerah (pada 2005).

Jika dilihat, hasil BUMD memberikan kontribusi terkecil selama 3 (tiga) tahun yaitu pada 2003, 2004, dan 2006. Ini menunjukkan bahwa kinerja BUMD di Kabupaten Wonogiri belum optimal. Kurangnya profesionalitas manajemen pengelola, dan kurangnya promosi membuat BUMD kalah bersaing dengan perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Wonogiri. Selain itu, belum terjalinnnya pola-pola kerjasama dengan pihak ketiga juga menghambat kemajuan BUMD di Kabupaten Wonogiri.

Namun, ini coba dibenahi dengan mengadakan studi banding ke Kabupaten Kutai (pada 2005), Kota Malang, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Riau Kepulauan (pada 2006) guna menambah wawasan para pengelola BUMD agar dapat mengoptimalkan kinerjanya. Sebagaimana diketahui bahwa ke empat Kabupaten itu merupakan Kabupaten dengan PAD yang tergolong besar di Indonesia ini. Kerjasama dengan pihak ketiga juga mulai dirintis pada awal 2007 ini, yaitu dengan pemerintah Kota Naning, Propinsi Guangzi, Tiongkok dalam hal

ekspor *gaplek*/chip ketela pohon (*cassava chip*). Dengan upaya ini diharapkan mampu mendongkrak PAD dari pos hasil BUMD.

b) Menghitung kontribusi masing-masing pos dalam dana perimbangan

1. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

2. Dana alokasi umum dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

3. Dana alokasi khusus dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

4. Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Propinsi dari total dana perimbangan dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi}}{\text{Total Dana Perimbangan}}$$

Berikut perhitungan kontribusi masing-masing pos dalam dana perimbangan yang tertuang dalam tabel 4.6 :

TABEL 4.6

**KONTRIBUSI MASING-MASING POS DALAM DANA PERIMBANGAN
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2003 – 2006**

No	Uraian	2003	2004	2005	2006
1.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	16.574.702.570	20.539.567.177	21.559.550.371	21.694.599.102

2.	Dana Alokasi Umum	311.090.000.000	326.104.000.000	336.549.000.000	523.439.000.000
3.	Dana Alokasi Khusus	7.200.000.000	9.350.000.000	13.030.000.000	1.687.685.326
4.	Bagi Hasil Pajak, Retribusi, dan Bantuan dari Propinsi	16.914.107.114	14.674.478.195	20.194.907.351	23.256.639.408
5.	Total Dana Perimbangan	351.778.809.684	370.668.045.372	391.333.457.722	570.077.923.836
6.	1 : 5 (dalam %)	4,71	5,54	5,51	3,81
7.	2 : 5 (dalam %)	88,43	87,98	86,00	91,82
8.	3 : 5 (dalam %)	2,05	2,52	3,33	3,00
9.	4 : 5 (dalam %)	4,81	3,96	5,16	4,08

Sumber : Nota Perhitungan APBD Kabupaten Wonogiri dan Dispenda Kabupaten Wonogiri, diolah

Dari tabel dapat terlihat bahwa kontribusi terbesar dalam pos dana perimbangan adalah dana alokasi umum, yaitu sebesar 88,43 % pada 2003, 87, 98 % pada 2004, 86 % pada 2005, dan 91,82 % pada 2006. Berturut-turut setelah dana alokasi umum adalah bagi hasil pajak, retribusi, dan bantuan dari propinsi lalu bagi hasil pajak/bukan pajak, dan dana alokasi khusus pada 2003 dan 2006, sedangkan pada 2004 dan 2005 setelah dana alokasi umum adalah bagi hasil pajak/bukan pajak, bagi hasil pajak, retribusi, dan bantuan dari propinsi, serta dana alokasi khusus.

Hal ini memang menjadi fenomena hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dimana dana perimbangan lebih besar dari pendapatan asli daerah, artinya kebutuhan daerah lebih dominan tercukupi oleh dana perimbangan dari pada pendapatan asli daerah itu sendiri. Kondisi ini disebut *Flypaper effect* dimana respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer dari pada responnya terhadap pendapatan daerah itu sendiri (Oates, 1999 dalam Halim, 2003) . Sebenarnya transfer/dana perimbangan ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar-daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah (Halim, 2003). Namun,

pada praktiknya, dana perimbangan ini digunakan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan belanja rutin daerah dan hanya sedikit yang digunakan untuk membiayai belanja pembangunan. (Halim, 2003). Memang inilah realita yang terjadi, bahwa sebenarnya daerah (baik propinsi maupun kabupaten/kota) belum bisa "menghidupi dirinya sendiri" dan masih sangat tergantung dengan bantuan pemerintah pusat. Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di Indonesia juga masih mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber pendapatan utamanya.

6) Menghitung Pertumbuhan Masing-masing Pos dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

a) Pertumbuhan pajak daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Total Pajak Daerah tahun } n}{\text{Total Pajak Daerah tahun } n-1} \times 100 \%$$

b) Pertumbuhan retribusi daerah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Total Retribusi Daerah tahun } n}{\text{Total Retribusi Daerah tahun } n-1} \times 100 \%$$

c) Pertumbuhan hasil Perusda (BUMD) dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Total Hasil BUMD tahun } n}{\text{Total Hasil BUMD tahun } n-1} \times 100 \%$$

d) Pertumbuhan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Total Lain-lain PAD yang Sah tahun } n}{\text{Total Lain-lain PAD yang Sah tahun } n-1} \times 100 \%$$

Berikut tabel pertumbuhan masing-masing pos dalam pendapatan asli daerah yang tersaji pada tabel 4.7 :

TABEL 4.7
PERTUMBUHAN MASING-MASING POS DALAM
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2003 – 2006

Uraian	2003	2004	2005	2006
Pajak Daerah				
-Realisasi (Rp)	5.007.555.185	5.635.354.126	5.281.804.117	6.417.902.875
-Pertumbuhan (%)	-	12,54	(6,27)	21,51
Retribusi Daerah				
-Realisasi (Rp)	12.833.745.739	16.203.778.646	17.041.914.486	19.002.419.419
-Pertumbuhan (%)	-	26,26	5,17	11,50
Hasil BUMD				
-Realisasi (Rp)	1.748.449.273	1.472.764.264	5.763.745.389	1.836.783.609
-Pertumbuhan (%)	-	(15,77)	291,36	31,87
Lain-lain PAD yang Sah				
-Realisasi (Rp)	6.528.928.634	6.173.956.340	5.291.427.271	12.370.772.058
-Pertumbuhan (%)	-	(5,44)	(14,29)	133,79

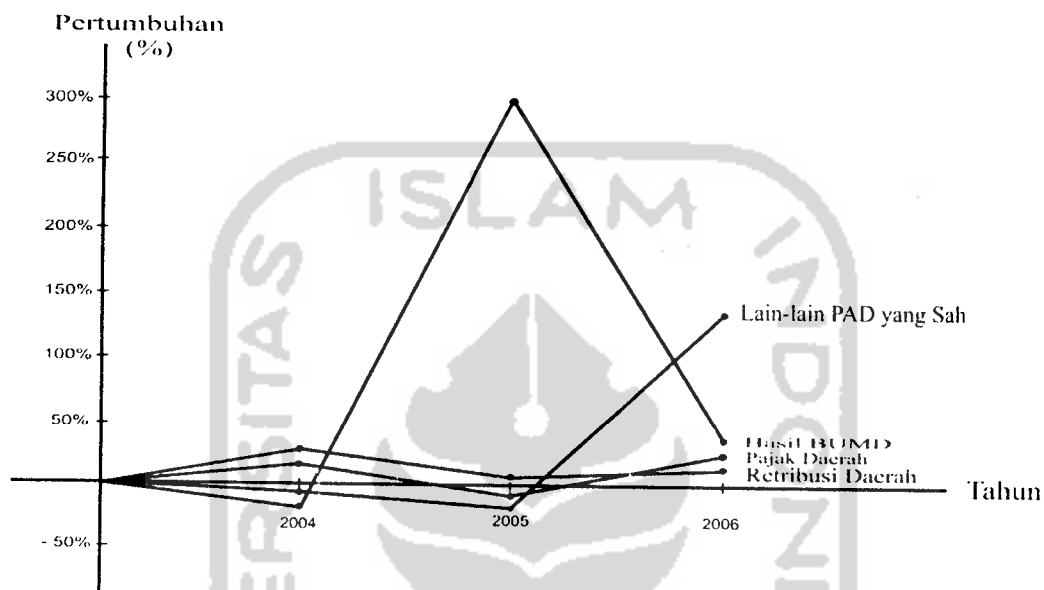
Sumber : Nota Perhitungan APBD Kabupaten Wonogiri dan Dispenda Kabupaten Wonogiri

Pertumbuhan pos-pos dalam pendapatan asli daerah yang terbesar pada tiap-tiap tahun berbeda-beda. Pada tahun 2004 pertumbuhan yang terbesar pada pos retribusi daerah yaitu sebesar 26,26 %, sedangkan pada 2004 pertumbuhan yang terbesar pada pos hasil BUMD yaitu sebesar 291,36 % dimana lonjakan besar ini dikarenakan pada 2005 dibagikan dividen Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng). Pada 2006 pertumbuhan terbesar pada pos lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar 133,79 %. Ini dikarenakan adanya lonjakan penerimaan jasa giro kas daerah sebesar 300 %. Melihat *trend*-nya, sulit untuk memprediksi pos mana yang mengalami pertumbuhan terbesar tiap tahunnya.

Melihat uraian di atas, terlihat bahwa BPD-Jateng belum mampu membagikan dividennya tiap tahun, ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak sehat. Penambahan modal diharapkan akan mampu mengembalikan BPD-Jateng yang di bawah kendali penuh pemerintah propinsi Jawa Tengah seperti semula.

GAMBAR 4.1

**GRAFIK PERTUMBUHAN MASING-MASING POS DALAM
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2003 – TAHUN 2006**



4.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana bantuan bagi daerah otonom yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan di bawahnya. Dana alokasi umum adalah salah satu pos yang terdapat di dalamnya. Besarnya dana alokasi umum untuk daerah Propinsi dan Kabupaten Kota dirumuskan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Kabupaten Wonogiri yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, mendapatkan dana alokasi umum yang lumayan besar karena daerahnya yang luas namun minim sumber daya alam. Sebagaimana diketahui bahwa semakin luas wilayah dan semakin banyak penduduk potensi sumber daya alamnya kecil akan

mendapatkan dana alokasi umum yang besar. Hal ini dimaksudkan untuk pemeratakan pembangunan di Indonesia ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bp. Edy Hartanto, SH Kasubid Anggaran Pembangunan Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri, bahwa perumusan formula dana alokasi umum yang terdapat pada PP No. 55 tahun 2005 telah memenuhi aspirasi Pemda Kabupaten Wonogiri dengan catatan adanya sedikit revisi untuk menentukan *score* dalam formula dana alokasi umum sekaligus juga melibatkan daerah dalam penentuan *score* tersebut.

Dana alokasi umum untuk Propinsi maupun Kabupaten Kota dirumuskan sebagai berikut :

Alokasi DAU untuk daerah dihitung dengan menggunakan formula:

$$DAU = CF + AD$$

Dimana :

DAU	=	Dana Alokasi Umum
CF	=	Celah Fiskal
AD	=	Alokasi Dasar
CF	=	Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Alokasi DAU untuk Provinsi dihitung dengan menggunakan formula:

$$DAU \text{ Provinsi}_i = \text{Bobot Provinsi}_i \times DAU \text{ Provinsi}$$

$$\text{Bobot Provinsi}_i = \frac{CF_{propinsi}}{\sum CF_{propinsi}}$$

Dimana :

$CF_{propinsi}$	=	celah fiskal suatu daerah provinsi
$\sum CF_{propinsi}$	=	total celah fiskal seluruh provinsi

$$DAU \text{ Kabupaten/Kota}_i = \text{Bobot Kabupten/Kota}_i \times DAU \text{ Kabupaten/Kota}$$

$$\text{Bobot Kabupaten/Kota}_i = \frac{CF_{\text{Kabupaten/kota}}}{\sum CF_{\text{Kabupaten/kota}}}$$

Dimana :

$$\begin{aligned} CF_{\text{Kabupaten/Kota}} &= \text{celah fiskal suatu daerah Kabupaten/Kota} \\ \sum CF_{\text{Kabupaten/Kota}} &= \text{total celah fiskal seluruh Kabupaten /Kota} \end{aligned}$$

Kebutuhan fiskal dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{Total Belanja Daerah Rata-rata} \times \alpha_1 \text{ indeks jumlah penduduk} + \alpha_2 \text{ indeks luas wilayah} + \alpha_3 \text{ indeks kemahalan konstruksi} + \alpha_4 \text{ indeks pembangunan manusia} + \alpha_5 \text{ indeks PDRB per kapita}$$

Keterangan :

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4,$ dan α_5 merupakan bobot masing-masing indeks yang ditentukan berdasarkan hasil uji statistik.

Kedua parameter dimaksud digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah dalam rangka pendanaan pelaksanaan Desentralisasi. Semakin kecil nilai indeks, semakin baik tingkat pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

$$\begin{aligned} \text{Total Belanja Daerah} \\ \text{Rata-rata} &= \frac{\text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Barang} + \text{Belanja Modal}}{\text{Jumlah Pr opinsi / Kabupaten Kota}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Jumlah} \\ \text{Penduduk Daerah} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk Daerah}}{\text{Rata - rata Jumlah Penduduk Nasional}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Luas Wilayah Daerah} &= \frac{\text{Luas Wilayah Daerah}}{\text{Rata - rata Luas Wilayah Secara Nasional}} \end{aligned}$$

Indeks Kemahalan

$$\text{Konstruksi Daerah} = \frac{\text{IndeksKemahalanKonstruksiDaerah}}{\text{Rata - rataKemahalanKonstruksiNasional}}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Pembangunan} \\ \text{Manusia} \end{aligned} = \frac{\text{IndeksPembangunanManusiaDaerah}}{\text{Rata - rataIPMSecaraNasional}}$$

$$\text{Indeks PDRB per Kapita Daerah} = \frac{\text{PDRBperKapitaDaerah}}{\text{Rata - rataPDRBperKapitaNasional}}$$

Dari rumus di atas Pemda Kabupaten Wonogiri menyarankan agar Pemerintah Pusat lebih menambah lagi alokasi dasar untuk daerah miskin sumber daya alam agar daerah tersebut tidak terlalu tertinggal dibandingkan dengan daerah yang kaya sumber daya alam. Daerah miskin sumber daya alam selain mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, juga masih sangat mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

4.3 Kendala-kendala

Mengamati hasil analisis kuantitatif di atas, terlihat bahwa Pemda Kabupaten Wonogiri telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya walaupun belum konstan pertumbuhannya. Pertumbuhan pos-pos pendapatan asli daerah masih mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Keadaan seperti ini menggambarkan belum optimalnya upaya Pemda Kabupaten Wonogiri yang dikarenakan adanya beberapa kendala di lapangan.

Adapun beberapa kendala dalam optimalisasi pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga obyek-obyek pungutan belum bisa terpungut secara optimal seperti di kecamatan-kecamatan.
- 2) Kurangnya pemahaman sistem dan prosedur tertib administrasi pendapatan daerah oleh satuan kerja pendapatan daerah.
- 3) Kurang optimalnya pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran dikarenakan pengusaha hotel dan pengusaha restoran belum berani menerapkan pajak hotel dan restoran secara penuh. Para pengusaha di Wonogiri masih takut karena jika nanti menerapkan pajak hotel dan restoran harga jual kepada konsumen akan naik dan konsumen akan 'lari'. Jadi besarnya pajak hotel dan pajak restoran selama ini merupakan hasil tawar-menawar kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan Dispenda Kabupaten Wonogiri.
- 4) Lambatnya pembahasan Raperda baru seperti Raperda tentang pajak kepemilikan pesawat televisi perorangan, Raperda tentang pajak penggunaan listrik di luar PLN, Raperda tentang kenaikan tarif retribusi izin usaha, dan Raperda tentang kenaikan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- 5) Belum optimalnya manajemen kewirausahaan pengelolaan BUMD.
- 6) Adanya tarik ulur antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang retribusi agraria, apakah masuk pajak daerah ataukah masuk pajak pusat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan :

- 1) Pada dasarnya Pemda Kabupaten Wonogiri mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan 2 cara, yaitu :
 - a) Intensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan pendapatan yang sudah ada. Dalam hal ini Pemda Kabupaten Wonogiri melakukannya dengan :
 1. Mengadakan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah serta menekan kebocoran. Hal ini telah terbukti dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, yaitu dengan indikasi meningkatnya jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang terbit dari tahun ke tahun, yaitu 187.516 pada 2003, 187.534 pada 2004, 187.549 pada 2005 dan 187.630 pada 2006. Kemudian dalam 1 (satu) tahun terakhir, yaitu pada 2006 telah didata sejumlah 55.652 wajib retribusi yang tersebar di seluruh kabupaten Wonogiri. Lalu untuk menekan kebocoran, dilakukan pengawasan oleh Satuan Kerja Pengelola Pendapatan (SKPP) yang lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
 2. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat atas pajak-pajak yang selama ini telah memberi

- kontribusi besar terhadap pendapatan daerah seperti pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C, dan pajak reklame.
3. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat atas retribusi-retribusi yang selama ini telah memberi kontribusi besar terhadap pendapatan daerah seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), retribusi izin hasil hutan, serta retribusi pelayanan pasar.
 4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pajak dan retribusi daerah selain yang disebutkan di atas.
 5. Merumuskan Perda No.9 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Perda No.3 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame. Dimana dalam Perda baru ini dirumuskan tarif baru yaitu 25 % dikali dengan lama pemasangan, jenis reklame, lokasi, dan ukuran reklame. Untuk Perda terdahulu tarifnya sebesar 15 %.
 6. Sedang dibahasnya pembuatan Revisi Perda secara bertahap tentang penyesuaian tarif retribusi yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak mengalami kenaikan tarif seperti retribusi izin usaha angkutan, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini.
 7. Meningkatkan kemampuan manajemen dan pelayanan BUMD. Untuk meningkatkan kemampuan manajemen, dilakukan beberapa kali studi banding guna mendapatkan gambaran bagaimana mereka

mengelola BUMD-nya. Pada 2005 dilakukan studi banding ke Kabupaten Kutai Kertanegara. Lalu, pada 2006 dilakukan studi banding ke Kota Malang dan Kota Pekanbaru. Dari hasil studi banding disimpulkan bahwa untuk mampu menciptakan perusahaan daerah yang memiliki daya saing tinggi dibutuhkan profesionalitas manajemen pengelolanya serta kualitas produk yang mampu bersaing di pasaran. Selain itu kerjasama dengan pihak ketiga juga diperlukan. Semua ini tentunya harus didukung dengan promosi yang cukup.

- b) Ekstensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru. Dalam hal ini Pemda Kabupaten Wonogiri melakukannya dengan :
1. Sedang dibahas Raperda baru seperti Raperda tentang pajak kepemilikan pesawat televisi perorangan dan Raperda penggunaan listrik di luar PLN. Hal ini dikarenakan selama ini 2 (dua) obyek tersebut memang penggunaannya cukup besar tetapi belum ada kontribusi untuk daerah, sehingga perlu dirancang Perda baru untuk kedua obyek tersebut sehingga nantinya akan memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah.
 2. Melakukan kerjasama dengan pemerintah kota Nanning, Propinsi Guangxi, Tiongkok dalam ekspor *gapple*/chip ketela pohon (*cassava chip*) yang ditangani oleh Perusda "Surya" yang tadinya hanya melakukan usaha perbengkelan saja. Oleh pemerintah kota Nanning, *gapple* ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan

bioetanol dan gula. Dengan begitu nantinya kerjasama ini akan memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

- 2) *Tax ratio* Kabupaten Wonogiri pada tahun 2004 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2003. Adapun pada tahun 2005 sudah mampu meningkatkan *tax ratio*-nya jika dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya. Adanya *trend* kenaikan *tax ratio* ini menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pajak daerahnya. Ini juga menunjukkan bahwa salah satu upaya intensifikasi yang dilakukan Pemda Kabupaten Wonogiri yaitu melalui pendataan wajib pajak dan retribusi daerah serta penekanan kebocoran pajak telah berhasil.
- 3) Rasio kepatuhan wajib pajak Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun menunjukkan kestabilan, yaitu sebesar 1 (satu) artinya wajib pajak dari pajak daerah yang ada di Kabupaten Wonogiri memang patuh dalam membayar pajak daerah. Dalam realisasinya memang Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan seluruhnya lunas dibayar oleh wajib pajak dan tepat waktu.
- 4) Rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun menunjukkan angka di bawah 1 (satu), artinya belum efektif, yaitu dalam memungut pendapatan asli daerah, Pemda Kabupaten Wonogiri belum bisa merealisasikan pendapatannya minimal sesuai dengan target atau bahkan melebihi target yang ada. Hal ini selain dikarenakan pembayaran pajak penerangan jalan untuk rekening bulan Desember dibayar bulan Januari tahun berikutnya (pengakuan basis kas), ada juga pos-pos dalam hasil BUMD yang tidak memberikan sumbangan pendapatan

sebagaimana yang ditargetkan. Sebagaimana yang tertera dalam APBD 2006, pos-pos tersebut adalah dari BPR-BKK dan dividen BPD Jateng. Untuk dividen BPD Jateng memang tidak bisa dibagikan tiap tahun karena bank ini tidak sehat. Direncanakan akan ada penyuntikan modal lagi dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagai salah satu upaya untuk menyetatkan lagi BPD Jateng yang berkedudukan di Kabupaten Wonogiri.

- 5) Persentase terbesar dari masing-masing pos pendapatan dari total pendapatan adalah dana perimbangan. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri masih sangat tergantung bantuan dari pusat, namun fenomena ini juga terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tentunya dengan persentase yang bervariasi.
- 6) Kontribusi terbesar dalam pos pendapatan asli daerah adalah pos retribusi daerah. Berturut-turut setelah retribusi daerah yaitu lain-lain PAD yang sah, pajak daerah, dan hasil BUMD (pada 2003, 2004, dan 2006) dan lain-lain PAD yang sah, hasil BUMD, serta pajak daerah (pada 2005). Ini memperlihatkan bahwa Pemda Kabupaten Wonogiri memiliki potensi retribusi daerah yang cukup besar dibandingkan dengan komponen lain dalam pos pendapatan asli daerah.
- 7) Kontribusi PAD terhadap total pendapatan berturut-turut sebesar 6,46 % pada 2003, 6,95 % pada 2004, 7,43 % pada 2005, dan 6,45 % pada 2006. Jika ini dibandingkan dengan rata-rata derajat desentralisasi Indonesia yaitu 7,12 % pada 2003 dan 7,73 % pada 2004 (Dewi, 2007), maka terlihat bahwa Kabupaten Wonogiri masih berada di bawah rata-rata tersebut. Jadi kemampuan menyelenggarakan desentralisasi Kabupaten Wonogiri masih

kerjasama ekspor *gaplek*/chip ketela pohon (*cassava chip*) dengan pemerintah kota Naning, Propinsi Guangzi, Tiongkok.

- 10) Pemda Kabupaten Wonogiri setuju dengan formula perhitungan dana alokasi umum menurut PP No. 55 tahun 2005 dengan catatan adanya sedikit revisi untuk menentukan *score* dalam formula dana alokasi umum sekaligus juga melibatkan daerah dalam penentuan *score* tersebut. Ini dimaksudkan agar tidak adanya kesenjangan yang terlalu jauh antar daerah yang kaya potensi alam dengan daerah yang miskin potensi alam.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan analisis hasil dan kesimpulan, penulis mengajukan saran :

- 1) Hendaknya Pemda menghitung kembali potensi riil pendapatan asli daerah (PAD serta merumuskan strategi guna merealisasikannya, terutama hasil BUMD dan lain-lain PAD yang sah, yang sebagaimana diketahui masih kurang kontribusinya jika dibanding dengan pajak dan retribusi daerah. Namun, perlu diingat bahwa kepentingan publik jangan pernah dikorbankan hanya demi meningkatkan PAD semata.
- 2) Hendaknya Pemda mengarahkan kegiatan pembangunan daerah kepada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah, semisal menambah kemampuan finansial BUMD dengan penambahan modal ataupun dengan revitalisasi peran BUMD.
- 3) Hendaknya pembangunan infrastruktur harus diutamakan sebagai prasyarat masuknya sektor swasta yang akan mendorong penurunan ketimpangan daerah khususnya pembangunan jalan. Jika Pemda merasa kesulitan dana,

di bawah rata-rata kemampuan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata derajat desentralisasi untuk daerah yang derajat desentralisasinya rendah (Kabupaten Wonogiri termasuk daerah yang derajat desentralisasinya rendah) yaitu 4,03 % pada 2003 dan 4,29 % pada 2004, maka Kabupaten Wonogiri masih di atas rata-ratanya.

- 8) Kontribusi terbesar dalam pos dana perimbangan adalah dana alokasi umum. Berturut-turut setelah dana alokasi umum adalah bagi hasil pajak, retribusi, dan bantuan dari propinsi lalu bagi hasil pajak/bukan pajak, dan dana alokasi khusus pada 2003 dan 2006, sedangkan pada 2004 dan 2005 adalah bagi hasil pajak/bukan pajak, bagi hasil pajak, retribusi, dan bantuan dari propinsi, serta dana alokasi khusus. Hal ini dikarenakan memang Kabupaten Wonogiri minim potensi sumber daya alam sehingga sumber dari bagi hasil pajak/bukan pajak serta retribusi sangat minim.
- 9) Pertumbuhan pos-pos dalam pendapatan asli daerah yang terbesar pada tiap-tiap tahun berbeda-beda. Pada tahun 2004 pertumbuhan yang terbesar pada pos retribusi daerah, sedangkan pada 2005 pertumbuhan yang terbesar pada pos hasil BUMD dikarenakan pada tahun ini dibagikan dividen Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng). Pada 2006 pertumbuhan terbesar pada pos lain-lain PAD yang sah, ini dikarenakan adanya lonjakan penerimaan jasa giro kas daerah. Melihat *trend*-nya, sulit untuk memprediksi pos mana yang mengalami pertumbuhan terbesar tiap tahunnya. Namun, jika dilihat pada 2007 ini kiranya akan terjadi lonjakan pertumbuhan yang signifikan pada pos hasil BUMD karena adanya

dapat menggunakan alternatif pembiayaan yang bersumber dari pinjaman, baik pinjaman uang/barang maupun penerbitan obligasi daerah.

- 4) Hendaknya Pemda mendesak DPRD Kabupaten Wonogiri untuk segera menyelesaikan Raperda baru yang sedang dibahas, yaitu tentang pajak kepemilikan pesawat televisi perorangan dan Raperda penggunaan listrik di luar PLN.
- 5) Hendaknya Pemda mengusulkan pada Pemerintah Pusat untuk menetapkan tarif pajak yang kompetitif. Penurunan tarif pajak diyakini akan merangsang wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Sebagai contoh Pemerintah Rusia pada tahun 2003 lalu memangkas tarif pajak penghasilan badan usaha dari 20% menjadi 13%. Pada tahun berikutnya, penerimaan pajak Pemerintah Rusia pun meningkat 30%.
- 6) Hendaknya Pemda lebih mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan, dimana dapat disiasati dengan menerbitkan obligasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Dana alokasi Umum untuk Propinsi Kabupaten/Kota Tahun 2003*, http://www.indonesia.go.id/produk_uu/produk2003/kp2003/kp1'03+lamp.htm
- _____, *Dana alokasi Umum untuk Propinsi Kabupaten/Kota Tahun 2004*, http://www.indonesia.go.id/produk_uu/produk2003/kp2003/kp109'03+lamp.htm
- _____, *Dana alokasi Umum untuk Propinsi Kabupaten/Kota Tahun 2005*, http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dau/DAU_2005lamp.htm
- _____, *Dana alokasi Umum untuk Propinsi Kabupaten/Kota Tahun 2006*, http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dau/DAU_2006lamp.htm
- Ardiana, Yuyun, *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang Proporsional (Studi Kasus pada Dispenda DIY)*, Skripsi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia : 2003
- Astuti, Esther Sri dan Joko Tri Haryanto, *Desentralisasi Fiskal Ketimpangan Daerah di Indonesia*, dalam Majalah Usahawan Nomor 02 TH XXXVI, Jakarta : 2007
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Ulasan Ekonomi Wonogiri Tahun 2005*, Bappeda Wonogiri : 2006
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2001
- Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta :2002
- Hamid, Edy Suandi, *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum*, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Volume 18, Yogyakarta : 2003
- Harian Umum, KOMPAS, *Berotonomi dengan PAD pas-pas'an*, Jakarta : 12 Juni 2001
- Harian Umum, KOMPAS. *Pajak Sebagai Stimulan*, Jakarta : 27 Mei 2006

Harian Umum, Pikiran Rakyat, *Format Baru Otonomi Daerah*, Bandung : 12 Juli 2002

Kustiawan, Memen, *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang Proporsional (Studi Kasus pada Dispenda Propinsi Jawa Barat)*, Komisi C Simposium Nasional Akuntansi IV : 2001

Landiyanto, Erlangga Agustino, *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Surabaya*, Working Paper No.05/01 : Januari 2005

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung : 2006

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Fokusmedia, Bandung : 2006

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah*, Fokusmedia, Bandung : 2006

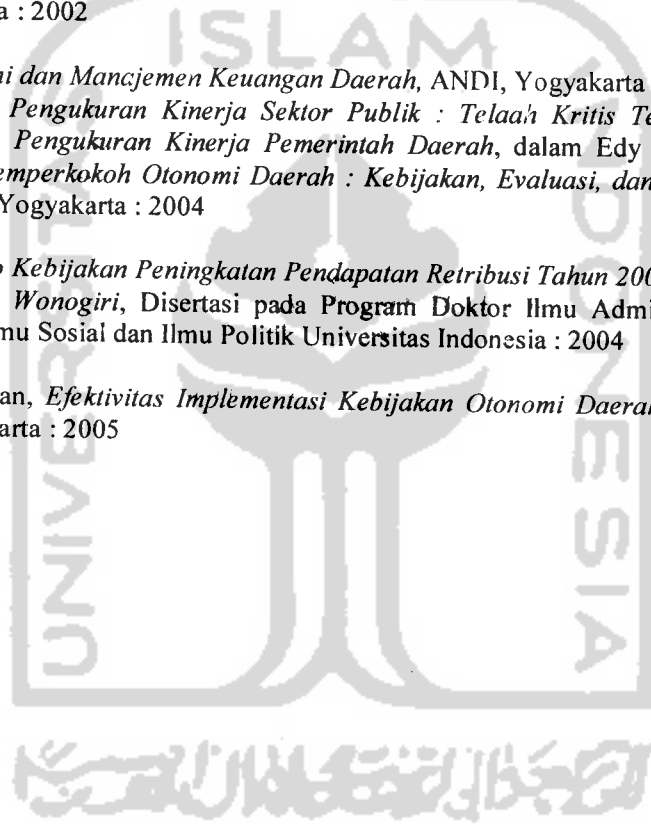
Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung : 2006

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung : 2006

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*, Fokusmedia, Bandung : 2006

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung : 2006

- Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Nuansa Aulia, Bandung : 2001
- Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP-STIM YKPN, Yogyakarta : 2007
- Mardiasmo, *Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD dalam Era Otonomi Daerah*, dalam Kajian Ekonomi Bisnis Indonesia STIEKERS, Yogyakarta : 2002
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta : 2002
- Mardiasmo, *Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Telaah Kritis Terhadap Kebutuhan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*, dalam Edy Suandy Hamid, *Memperkokoh Otonomi Daerah : Kebijakan, Evaluasi, dan Saran*, UII Press, Yogyakarta : 2004
- Sujak, Abi, *Skenario Kebijakan Peningkatan Pendapatan Retribusi Tahun 2005-2010 Kabupaten Wonogiri*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia : 2004
- Sumaryadi, I Nyoman, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta : 2005





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 386/DEK/10/Div.Um/XII/2006
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

27 Desember 2006

Kepada Yth.
Pimpinan BAPPEDA
Kabupaten Wonogiri
di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Hendy Lesa Prabowo
No. Mahasiswa : 03312157
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jagalan RT. 8/ III, Tegaltirto, Berbah , Sleman,

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN YANG PROPORSIONAL. (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI)

Dosen Pembimbing : Arief Rahman, SE, S.IP, M.Com

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb



Drs. Asma'i Ishak, M.Bus., Ph.D. *AI*
843110101



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jalan Pemuda I / 26 Telepon (0273) 321131, Fax. 322102
WONOGIRI 57612

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

Nomor : 072/S/252/2006

- I. Dasar : Surat Rekomendasi Research/Survey dari Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Wonogiri Nomor : 072/869 tanggal 29 Desember 2006.
- II. Dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri (BAPPEDA) atas nama Bupati Wonogiri menyatakan tidak keberatan atas dilaksanakannya Research/survey di Kabupaten Wonogiri, oleh :
1. Nama : **HENDY LESA PRABOWO**
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Jagalan RT. 08/ RW. 03 Tegaltirto Berbah Sleman
 4. Penanggung Jawab : Drs. Asma'i Ishak, M.Bus, PhD
 5. Maksud tujuan Research / Survey : Melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:
"PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN YANG PROPORSIONAL (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI)".
 6. Lokasi : 1. DIPENDA Kab. Wonogiri..
 7. Peserta : -
- III. Surat ijin ini berlaku tanggal, 29 Desember 2006 s/d 29 Januari 2007

Dengan ketentuan :

- a. Pelaksanaan Research/Survey tidak boleh dilaksanakan untuk kepentingan-kepentingan yang dapat merugikan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- b. Sebelum melaksanakan Research/Survey supaya melapor diri kepada Pejabat-pejabat Daerah yang bersangkutan.
- c. Setelah Research/Survey selesai supaya memberikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Wonogiri.

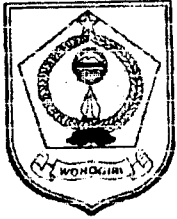
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Dikeluarkan di Wonogiri, 29 Desember 2006
An.KEPALA BAPPEDA KABUPATEN



TEMBUSAN Kepada Yth:

1. Kakan Kesbang dan Linmas Kab. Wonogiri;
2. Kakan Satpol PP Kab. Wonogiri;
3. Kasat. Intelpam Polres Wonogiri;
4. Ka DIPENDA Kab. Wonogiri;
5. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. R.M. Said No. Telp. (0273) 322805 Fax. 322804
WONOGIRI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072 / 23 / 2007.

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri dengan ini menerangkan bahwa :

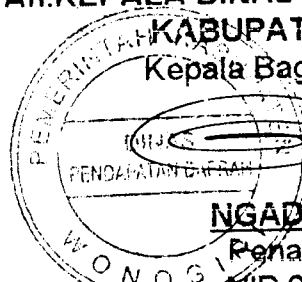
Nama : HENDY LESA PRABOWO
Pekerjaan : Mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
NIM : 03 312 157
Jurusan : Si Akuntansi

Telah melaksanakan Penelitian / Survey pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri mulai dari tanggal 02 s/d 13 Januari 2007, untuk mengumpulkan data guna menyusun Tugas Akhir dengan judul " PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN YANG PROPORSIONAL (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 13 Januari 2007

An.KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Bagian Tata Usaha



NGADIMIN, S.Sos
Pegawai Tingkat I

Ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003
(dalam Milyar Rupiah)

NO	Uraian	Realisasi (Rp)
I	PENDAPATAN	Rp 404,098.282.515
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 26,118.678.231
	Pajak Daerah	5,007.555.185
	Retribusi Daerah	12,833.745.739
	Bagian Laba Usaha Daerah	1,748.449.273
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	6,528.928.634
2	Dana Perimbangan	Rp 351,778.809.684
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	16,574.702.570
	Dana Alokasi Umum	311,090.000.000
	Dana Alokasi Khusus	7,200.000.000
	Dana Perimbangan dari Propinsi*)	16.914.107
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 26,200.794.000
	Jumlah Pendapatan	Rp 404,098.282.515
II	BELANJA	
1	APARATUR NEGARA	Rp 92,438.465.383
1	Belanja Administrasi Umum	Rp 67,815.352.438
	Belanja Pegawai/Personalia	59,505.731.743
	Belanja Barang dan Jasa	5,181.513.255
	Belanja Perjalanan Dinas	1,679.855.400
	Belanja Pemeliharaan	1,448.252.040
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 11,328.407.234
	Belanja Pegawai/Personalia	8,265.847.213
	Belanja Barang dan Jasa	2,277.652.371
	Belanja Perjalanan Dinas	765.026.100
	Belanja Pemeliharaan	19.881.550
3	Belanja Modal/Pembangunan	Rp 13,294.705.711
2	PELAYANAN PUBLIK	Rp 311,154.903.694
1	Belanja Administrasi Umum	Rp 191,005.117.494
	Belanja Pegawai/Personalia	183,770.299.714
	Belanja Barang dan Jasa	6,682.150.150
	Belanja Perjalanan Dinas	0
	Belanja Pemeliharaan	552.667.630
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 27,045.652.553
	Belanja Pegawai/Personalia	12,239.979.568
	Belanja Barang dan Jasa	11,300.758.870
	Belanja Perjalanan Dinas	9.590.000
	Belanja Pemeliharaan	3,495.324.115
3	Belanja Modal/Pembangunan	Rp 79,460.576.834
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	0
5	Belanja Tidak Tersangka	0
	Jumlah Belanja	Rp 403,593.369.077
	Surplus/(Defisit)	Rp 504.913.438
III	PEMBIAYAAN	
1	Penerimaan Daerah	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	24,662.855.020
	Transfer dari Dana Cadangan	0
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	0
	Penerimaan Piutang Daerah	3,100.215.059
	Hasil Penerimaan Daerah Lain	26,993.771.251
	Jumlah Penerimaan Daerah	Rp 54,756.841.330
2	Pengeluaran Daerah	
	Transfer ke Dana Cadangan	0
	Penyertaan Modal	7,558.822.000
	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	47.680.200
	Pengeluaran Daerah Lainnya	26,993.771.252
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	0
	Jumlah Pengeluaran Daerah	Rp 34,600.273.452
	Surplus/Defisit Pembiayaan	Rp 20,156.567.878

*) Untuk Kabupaten / Kota

Ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2004
(dalam Milyar Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI (RP)
I	PENDAPATAN	
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 29,485.853.376
	Pajak Daerah	5,635.354.126
	Retribusi Daerah	16,203.778.646
	Bagian Laba Usaha Daerah	1,472.764.264
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	6,173.956.340
2	Dana Perimbangan	Rp 370,668.045.372
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	20,539.567.177
	Dana Alokasi Umum	326,104.000.000
	Dana Alokasi Khusus	9,350.000.000
	Dana Perimbangan dari Propinsi*)	14,674.478.195
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 24,026.354.000
	Jumlah Pendapatan	Rp 424,180.252.748
II	BELANJA	
1	APARATUR NEGARA	Rp 100,278.649.602
1	Belanja Administrasi Umum	Rp 78,770.930.963
	Belanja Pegawai/Personalia	71,393.936.284
	Belanja Barang dan Jasa	4,258.763.029
	Belanja Perjalanan Dinas	1,461.157.850
	Belanja Pemeliharaan	1,657.193.800
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 11,306.091.439
	Belanja Pegawai/Personalia	7,191.009.252
	Belanja Barang dan Jasa	2,618.783.297
	Belanja Perjalanan Dinas	893.058.890
	Belanja Pemeliharaan	603.240.000
3	Belanja Modal/Pembangunan	Rp 10,201.627.200
2	PELAYANAN PUBLIK	Rp 321,745.434.000
1	Belanja Administrasi Umum	Rp 210,019.045.749
	Belanja Pegawai/Personalia	200,468.594.070
	Belanja Barang dan Jasa	8,684.513.429
	Belanja Perjalanan Dinas	0
	Belanja Pemeliharaan	865938.250
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 29,545.229.949
	Belanja Pegawai/Personalia	22,681.154.291
	Belanja Barang dan Jasa	4,160.118.103
	Belanja Perjalanan Dinas	51.874.000
	Belanja Pemeliharaan	2,652.013.555
3	Belanja Modal/Pembangunan	Rp 59,983.329.480
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp 16,524.178.075
5	Belanja Tidak Tersangka	Rp 5,673.650.747
	Jumlah Belanja	Rp 424,024.083.602
	Surplus/(Defisit)	Rp 2,156.169.146
III	PEMBIAYAAN	
1	Penerimaan Daerah	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	20,661.481.716
	Transfer dari Dana Cadangan	0
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	0
	Penerimaan Piutang Daerah	5,463.789.790
	Hasil Penerimaan Daerah Lain	28,050.670.113
	Jumlah Penerimaan Daerah	Rp 54,175.950.619
2	Pengeluaran Daerah	
	Transfer ke Dana Cadangan	0
	Penyertaan Modal	1,560.000.000
	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	637.918.815
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sekarang	26,083.242.986
	Jumlah Pengeluaran Daerah	Rp 56,332.119.765
	Surplus/Defisit Pembiayaan	Rp (2,156.169.146)

*) Untuk Kabupaten / Kota

Ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005
(dalam Milyar Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI (RP)
I	PENDAPATAN	
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 33,378.891.263
	Pajak Daerah	5,281.804.117
	Retribusi Daerah	17,041.914.486
	Bagian Laba Usaha Daerah	5,763.745.389
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5,291.427.271
2	Dana Perimbangan	Rp 391,333.457.772
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	21,559.550.371
	Dana Alokasi Umum	336,549.000.000
	Dana Alokasi Khusus	13,030.000.000
	Dana Perimbangan (dari Propinsi*)	20,194.907.351
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 24,669.920.000
	<i>Jumlah Pendapatan</i>	<i>Rp 449,382.268.985</i>
II	BELANJA	
1	APARATUR NEGARA	Rp 100,318.233.555
1	Belanja Administrasi Umum	Rp 81,533.765.706
	Belanja Pegawai/Personalia	71,694.959.732
	Belanja Barang dan Jasa	8,683.832.779
	Belanja Perjalanan Dinas	1,178.837.520
	Belanja Pemeliharaan	1,796.135.675
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 9,890.418.404
	Belanja Pegawai/Personalia	3,588.929.129
	Belanja Barang dan Jasa	5,107.968.425
	Belanja Perjalanan Dinas	1,129.953.950
	Belanja Pemeliharaan	63.566.900
3	Belanja Modal/Pembangunan	Rp 8,894.049.445
2	PELAYANAN PUBLIK	Rp 340,541.983.358
1	Belanja Administrasi Umum	Rp 215,848.482.938
	Belanja Pegawai/Personalia	205,349.669.986
	Belanja Barang dan Jasa	9,644.108.797
	Belanja Perjalanan Dinas	0
	Belanja Pemeliharaan	854.704.155
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 22,279.617.480
	Belanja Pegawai/Personalia	6,783.023.005
	Belanja Barang dan Jasa	10,744.255.775
	Belanja Perjalanan Dinas	1,239.863.430
	Belanja Pemeliharaan	3,512.475.270
3	Belanja Modal/Pembangunan	Rp 65,960.802.833
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp 33,534.080.927
5	Belanja Tidak Tersangka	Rp 2,918.999.180
	<i>Jumlah Belanja</i>	<i>Rp 440,860.216.913</i>
	<i>Surplus/(Defisit)</i>	<i>Rp 8,522.052.072</i>
III	PEMBIAYAAN	
1	Penerimaan Daerah	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	26,083.242.986
	Transfer dari Dana Cadangan	0
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	0
	Penerimaan Piutang Daerah	3,699.493.841
	Hasil Penerimaan Daerah Lain	28,174.568.328
	<i>Jumlah Penerimaan Daerah</i>	<i>Rp 57,957.305.155</i>
2	Pengeluaran Daerah	
	Penyertaan Modal	4,888.000.000
	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	104.173.980
	Pengeluaran Daerah Lainnya	28,174.568.223
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sekarang	33,312.615.024
	<i>Jumlah Pengeluaran Daerah</i>	<i>Rp 66,476.572.532</i>
	<i>Surplus/Defisit Pembiayaan</i>	<i>Rp (8,522.052.072)</i>

*) Untuk Kabupaten / Kota

**Ringkasan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2006
(dalam Milyar Rupiah)**

NO	URAIAN	REALISASI (RP)
I	PENDAPATAN	
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 39,627.599.307
	Pajak Daerah	6,417.902.875
	Retribusi Daerah	19,002.419.419
	Bagian Laba Usaha Daerah	1,836.504.955
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	12,370.772.058
2	Dana Perimbangan	Rp 570,077.923.836
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	21,694.599.102
	Dana Alokasi Umum	523,439.000.000
	Dana Alokasi Khusus	1,687.685.326
	Dana Perimbangan dari Propinsi*)	23,256.639.408
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	0
	<i>Jumlah Pendapatan</i>	Rp 609,705.523.143
II	BELANJA	
1	APARATUR NEGARA	
1	Belanja Administrasi Unum	
	Belanja Pegawai/Personalia	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Perjalanan Dinas	
	Belanja Pemeliharaan	
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
	Belanja Pegawai/Personalia	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Perjalanan Dinas	
	Belanja Pemeliharaan	
3	Belanja Modal/Pembangunan	
2	PELAYANAN PUBLIK	
1	Belanja Administrasi Umum	
	Belanja Pegawai/Personalia	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Perjalanan Dinas	
	Belanja Pemeliharaan	
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
	Belanja Pegawai/Personalia	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Perjalanan Dinas	
	Belanja Pemeliharaan	
3	Belanja Modal/Pembangunan	
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	
5	Belanja Tidak Tersangka	
	<i>Jumlah Belanja</i>	
	<i>Surplus/(Defisit)</i>	
III	PEMBIAYAAN	
1	Penerimaan Daerah	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	
	Transfer dari Dana Cadangan	
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	
	<i>Jumlah Penerimaan Daerah</i>	
2	Pengeluaran Daerah	
	Transfer ke Dana Cadangan	
	Penyertaan Modal	
	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sekarang	
	<i>Jumlah Pengeluaran Daerah</i>	
	<i>Surplus/(Defisit) Pembiayaan</i>	

*) Untuk Kabupaten / Kota

- Untuk data belanja dan pembiayaan belum dapat diakses saat penelitian berlangsung

**RINCIAN DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN/KOTA
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2003
(MILIAR RUPIAH)**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi
1.	Kabupaten Banjarnegara	248,82
2.	Kabupaten Banyumas	353,88
3.	Kabupaten Batang	205,69
4.	Kabupaten Blora	270,14
5.	Kabupaten Boyolali	292,07
6.	Kabupaten Brebes	357,38
7.	Kabupaten Cilacap	368,27
8.	Kabupaten Demak	245,94
9.	Kabupaten Grobogan	315,97
10.	Kabupaten Jepara	248,66
11.	Kabupaten Karanganyar	266,55
12.	Kabupaten Kebumen	315,40
13.	Kabupaten Kendal	270,56
14.	Kabupaten Klaten	374,12
15.	Kabupaten Kudus	212,68
16.	Kabupaten Magelang	280,25
17.	Kabupaten Pati	300,90
18.	Kabupaten Pekalongan	222,58
19.	Kabupaten Pemasang	297,36
20.	Kabupaten Purbalingga	236,80
21.	Kabupaten Purworejo	269,17
22.	Kabupaten Rembang	188,93
23.	Kabupaten Semarang	255,84
24.	Kabupaten Sragen	271,94
25.	Kabupaten Sukoharjo	253,71
26.	Kabupaten Tegal	309,63
27.	Kabupaten Temanggung	221,66
28.	Kabupaten Wonogiri	311,09
29.	Kabupaten Wonosobo	220,99
30.	Kota Magelang	119,98
31.	Kota Pekalongan	122,17
32.	Kota Salatiga	105,69
33.	Kota Semarang	308,71
34.	Kota Surakarta	215,28
35.	Kota Tegal	151,65
	Jumlah DAU Se-Propinsi	9.520,32

**RINCIAN DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN/KOTA
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2004
(MILIAR RUPIAH)**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi
1.	Kabupaten Banjarnegara	260,996
2.	Kabupaten Banyumas	374,867
3.	Kabupaten Batang	211,879
4.	Kabupaten Blora	285,250
5.	Kabupaten Boyolali	300,183
6.	Kabupaten Brebes	375,146
7.	Kabupaten Cilacap	378,021
8.	Kabupaten Demak	258,928
9.	Kabupaten Grobogan	331,415
10.	Kabupaten Jepara	258,973
11.	Kabupaten Karanganyar	277,906
12.	Kabupaten Kebumen	339,716
13.	Kabupaten Kendal	286,808
14.	Kabupaten KlATEN	382,345
15.	Kabupaten Kudus	217,441
16.	Kabupaten Magelang	304,621
17.	Kabupaten Pati	312,712
18.	Kabupaten Pekalongan	233,319
19.	Kabupaten Pemasang	312,264
20.	Kabupaten Purbalingga	246,694
21.	Kabupaten Purworejo	275,194
22.	Kabupaten Rembang	196,642
23.	Kabupaten Semarang	196,642
24.	Kabupaten Sragen	283,621
25.	Kabupaten Sukoharjo	263,304
26.	Kabupaten Tegal	323,652
27.	Kabupaten Temanggung	228,086
28.	Kabupaten Wonogiri	326,104
29.	Kabupaten Wonosobo	231,629
30.	Kota Magelang	122,298
31.	Kota Pekalongan	125,408
32.	Kota Salatiga	107,734
33.	Kota Semarang	310,736
34.	Kota Surakarta	218,045
35.	Kota Tegal	178,273
	Jumlah DAU Se-Propinsi	9.961,491

**RINCIAN DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN/KOTA
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005
(MILIAR RUPIAH)**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi
1.	Kabupaten Banjarnegara	276,999
2.	Kabupaten Banyumas	404,114
3.	Kabupaten Batang	222,826
4.	Kabupaten Blora	285,250
5.	Kabupaten Boyolali	313,078
6.	Kabupaten Brebes	402,905
7.	Kabupaten Cilacap	392,866
8.	Kabupaten Demak	280,831
9.	Kabupaten Grobogan	344,330
10.	Kabupaten Jepara	276,946
11.	Kabupaten Karanganyar	284,448
12.	Kabupaten Kebumen	362,789
13.	Kabupaten Kendal	286,808
14.	Kabupaten Klaten	404,869
15.	Kabupaten Kudus	227,890
16.	Kabupaten Magelang	329,065
17.	Kabupaten Pati	337,244
18.	Kabupaten Pekalongan	253,342
19.	Kabupaten Pemasang	330,900
20.	Kabupaten Purbalingga	263,393
21.	Kabupaten Purworejo	281,270
22.	Kabupaten Rembang	215,234
23.	Kabupaten Semarang	279,060
24.	Kabupaten Sragen	306,460
25.	Kabupaten Sukoharjo	272,531
26.	Kabupaten Tegal	344,869
27.	Kabupaten Temanggung	233,303
28.	Kabupaten Wonogiri	336,549
29.	Kabupaten Wonosobo	243,974
30.	Kota Magelang	125,606
31.	Kota Pekalongan	132,335
32.	Kota Salatiga	124,117
33.	Kota Semarang	332,098
34.	Kota Surakarta	218,082
35.	Kota Tegal	178,273
	Jumlah DAU Se-Propinsi	9.904,654

**RINCIAN DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN/KOTA
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006
(MILIAR RUPIAH)**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi
1.	Kabupaten Banjarnegara	422,509
2.	Kabupaten Banyumas	603,886
3.	Kabupaten Batang	333,433
4.	Kabupaten Blora	410,074
5.	Kabupaten Boyolali	492,181
6.	Kabupaten Brebes	609,597
7.	Kabupaten Cilacap	661,263
8.	Kabupaten Demak	408,452
9.	Kabupaten Grobogan	512,838
10.	Kabupaten Jepara	403,189
11.	Kabupaten Karanganyar	421,432
12.	Kabupaten Kebumen	536,689
13.	Kabupaten Kendal	409,296
14.	Kabupaten Klaten	635,487
15.	Kabupaten Kudus	359,183
16.	Kabupaten Magelang	502,945
17.	Kabupaten Pati	509,572
18.	Kabupaten Pekalongan	377,379
19.	Kabupaten Pemasang	491,282
20.	Kabupaten Purbalingga	383,925
21.	Kabupaten Purworejo	432,012
22.	Kabupaten Rembang	342,777
23.	Kabupaten Semarang	412,468
24.	Kabupaten Sragen	466,851
25.	Kabupaten Sukoharjo	421,438
26.	Kabupaten Tegal	510,555
27.	Kabupaten Temanggung	357,822
28.	Kabupaten Wonogiri	523,439
29.	Kabupaten Wonosobo	359,723
30.	Kota Magelang	216,061
31.	Kota Pekalongan	209,650
32.	Kota Salatiga	185,429
33.	Kota Semarang	513,812
34.	Kota Surakarta	334,287
35.	Kota Tegal	189,007
	Jumlah DAU Se-Propinsi	14.959,943

RINGKASAN WAWANCARA

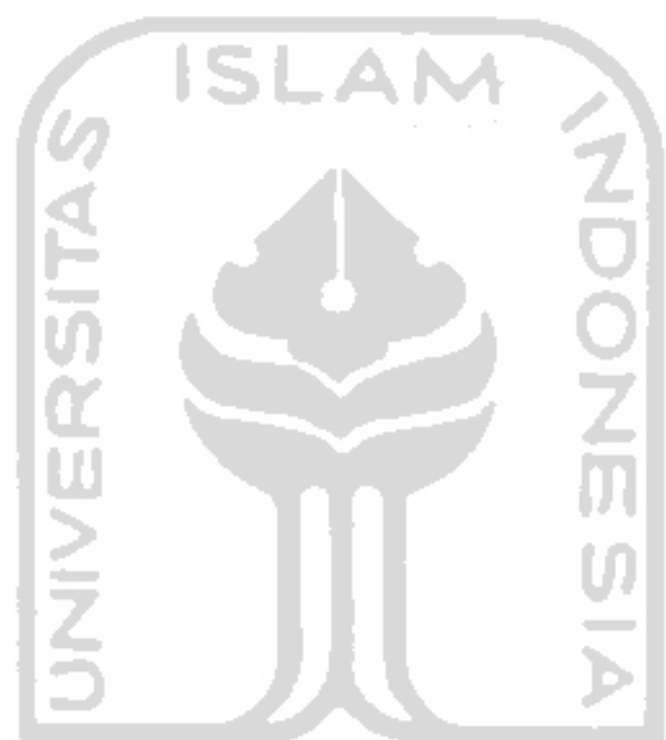
Wawancara dilakukan dengan Bp. Edy Hartanto, SH, Kasubid Anggaran Pembangunan Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kabupaten Wonogiri. Berikut ringkasan wawancaranya :

Tanya : *Menurut BPKD sebagai pengelola DAU di Kabupaten Wonogiri, apakah formula perhitungan dana alokasi umum (DAU) dalam PP No. 55 Tahun 2005 telah memenuhi aspirasi Kabupaten Wonogiri?*

Jawab : Menurut kami, perhitungan DAU sebagai *block grant* telah memenuhi aspirasi Kabupaten Wonogiri. Sebagaimana diketahui bahwa dana alokasi umum dibagikan kepada daerah sebagai dana perimbangan agar tidak terjadi ketimpangan antara daerah yang kaya dan daerah yang miskin. Dana alokasi umum dibagikan dengan melihat dasar luas wilayah, jumlah penduduk, dan sumber daya alam suatu daerah. Untuk daerah yang lumayan luas, jumlah penduduk yang banyak, namun kurang dalam hal sumber daya alam seperti Wonogiri ini mendapatkan dana alokasi umum yang lumayan besar. Jadi antara luas wilayah dan jumlah penduduk berbanding lurus, dan keduanya berbanding terbalik dengan sumber daya alam. Pada dasarnya kami setuju terhadap perumusan DAU tersebut, namun hendaknya ada sedikit revisi dalam penentuan *score*-nya dan juga adanya pelibatan daerah dalam menentukan *score*. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan yang jauh antara daerah yang miskin dengan daerah yang kaya sumber daya alamnya. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan nasional.

Tanya : *Apakah DAU ini sudah proporsional?*

Jawab : Apakah proporsional atau belum, kami rasa ini sudah proporsional, yaitu telah sesuai antara kebutuhan dengan alokasi yang ada. Namun, dari DAU yang dibagikan, kebanyakan habis untuk belanja administrasi umum dan pelayanan publik. Jadi, dana untuk belanja pembangunan sangat minim atau bahkan tidak ada. Ini jelas menghambat pembangunan, tetapi kami selalu berupaya untuk meningkatkan PAD yang ada sebagai sumber dana dalam belanja pembangunan.



جامعة الإسلام في إندونيسيا

